

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II

**LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR**

2025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II (TW II) Tahun 2025 tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi pembina, sekaligus menjadi sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Loka POM. Selain itu, laporan ini juga berperan penting dalam memperbaiki serta merumuskan strategi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Isi laporan mencakup isu-isu strategis yang sedang dihadapi, serta pencapaian kinerja Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 2025. Evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja serta penggunaan anggaran yang telah direalisasikan juga turut disampaikan dalam laporan ini. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja dan anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan pengambilan kebijakan ke depan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan, khususnya kepada seluruh pegawai Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas komitmen dan kerja keras mereka dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah 3T ini.

Saumlaki, 18 Juli 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Publik dan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai instansi induk. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 dimana seluruh program mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025 – 2029.

Pada perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 terdapat 8 Sasaran strategis dengan 23 indikator kegiatan utama (IKU). Dari 8 Sasaran Strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Istimewa”, 3 sasaran strategis memperoleh nilai “Baik”, dan 2 sasaran strategis belum memiliki target dan realisasi di TW II atau N/A.

Berikut adalah rincian nilai pencapaian strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tahun 2025 :

1. Sasaran Strategis pertama (SS1) yakni meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan capaian 93,39% dengan kategori Baik.
2. Sasaran Strategis ketiga (SS3) yakni menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan capaian 104,93% dan kategori Istimewa.
3. Sasaran Strategis keempat (SS4) yakni meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan capaian 99,36% dengan kategori Baik.
4. Sasaran Strategis kelima (SS5) yakni meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian 107,84 dan Kategori Istimewa.
5. Sasaran Strategis keenam (SS6) yakni terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan capaian dan Kategori N/A.

6. Sasaran Strategis ketujuh (SS7) yakni Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
7. Sasaran Strategis kedelapan (SS8) yakni Layanan Publik UPT yang Prima dengan capaian dan Kategori N/A.
8. Sasaran Strategis kesembilan (SS9) yakni Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan capaian 104,25% dengan kategori Istimewa.

Berdasarkan capaian pada sasaran strategis diatas, maka nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) total Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 101,63%. Terdapat beberapa beberapa analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pada kinerja antara lain terletaknya koordinasi aktif dengan kejaksaan, pelaksanaan KIE door to door, serta kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan komunitas. Selain itu, kegiatan advokasi dan sosialisasi keamanan pangan juga telah dilaksanakan secara merata ke sekolah dan komunitas desa. Pengawasan terhadap iklan dan pelaksanaan rapid test obat pun telah dilakukan sesuai pedoman. Di sisi tata kelola internal, pelaporan manajemen risiko serta implementasi Reformasi Birokrasi (RB) juga menjadi langkah positif dalam menjaga akuntabilitas. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sarana produksi, wilayah pengawasan yang luas, rendahnya efektivitas KIE, dan belum optimalnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan, menjadi penghambat dalam pencapaian target yang telah direncanakan.

Sebagai rencana aksi, perlu dilakukan optimalisasi sinergi dengan pemangku kepentingan daerah dan pelaku usaha untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan variasi sampel. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Diperlukan juga perencanaan logistik yang matang untuk pemeriksaan sarana produksi di lokasi terpencil. Perbaikan infrastruktur laboratorium mini, seperti penyediaan exhaust portable dan tempat khusus lampu UV, harus segera dilakukan untuk menjamin keamanan dan efisiensi pengujian. Dalam hal pembinaan sarana pelanggar, pendekatan edukatif tetap dipertahankan sambil meningkatkan pengawasan berkelanjutan. Penyesuaian sistem pengadaan dan pelatihan penggunaan aplikasi inaproc juga harus menjadi prioritas guna mempercepat penyerapan anggaran serta mendukung kelancaran operasional ke depan.

Jumlah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 12.282.785.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2025 hingga TW II adalah Rp. 1.180.264.603 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 9,61 %. Jika dilihat dari tingkat efisiensi (TE), penggunaan anggaran tergolong kategori tidak efisien dengan hasil seluruh indikator tidak efisien terhadap pagu awal namun efisien terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara <0,00 sampai 23,43. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (anggaran dan manusia) terbatas, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

HIGHLIGHT TRIWULAN II TAHUN 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA DISTRIBUSI PANGAN

29 April 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA DISTRIBUSI PANGAN

03 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA DISTRIBUSI PANGAN

05 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN
SARANA DISTRIBUSI PANGAN & KOSMETIK

06 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN SARANA DISTRIBUSI PANGAN & KOSMETIK

07 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN
SARANA DISTRIBUSI PANGAN & KOSMETIK
21 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA DISTRIBUSI PANGAN

13 Juni 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA PRODUKSI UMKM

TAHU PAK JEMUK

17 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

SARANA PRODUKSI UMKM

ARDHELLA

19 Juni 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

**PEMERIKSAAN SARYANFAR
GFK SAUMLAKI**

24 April 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN SARYANFAR PUSKESMAS WEET

05 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN SARYANFAR PUSKESMAS WERWARU

06 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN SARYANFAR PUSKESMAS SEIRA

21 Mei 2025

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN SARYANFAR RSUD TIAKUR

26 Juni 2025



INFOKOM

**KIE GIZI SEIMBANG CEGAH STUNTING
WUJUDKAN GENERASI SEHAT DAN
CERDAS, KAB. MALUKU BARAT DAYA**

24 Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT TRIWULAN II TAHUN 2025	v
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxxii
DAFTAR GAMBAR	xxxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1. Luas Wilayah Kerja	4
2. Jumlah Kabupaten/Kota	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4 ISU STRATEGIS	7
1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis	7
1. Isu Internal	7
a. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
b. Pengembangan Kompetensi	9
c. Sarana Prasarana	9
d. Teknologi	9
e. Hasil Analisis SWOT	10
2. Isu Eksternal	12
a. Geografis	12
b. Transportasi	12
c. Iklim	12
1.4.2 Isu Strategis Tahun 2025	13
1. Kapasitas Pengujian Loka	13
2. Sumber Daya Manusia	14
3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2025-2029	17
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	21
2.3 PERJANJIAN KINERJA 2025	24
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2025	27
2.5 METODE PENGUKURAN	31
BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	41
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	41
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	42
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	43
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
e. Upaya Peningkatan	43
2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	44
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	44
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	45
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	46

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	46
e. Upaya Peningkatan	46
3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar .	47
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	47
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	48
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	48
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	48
e. Upaya Peningkatan	48
4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	48
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	49
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	50
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	50
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	51
e. Upaya Peningkatan	51
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	51
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	52

b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	52
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	53
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	53
e. Upaya Peningkatan	53
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
a. Perbandingan Realiasasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	54
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	55
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	55
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
e. Upaya Peningkatan	56
7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	56
a. Perbandingan Realiasasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	57
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	57
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	58

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
e. Upaya Peningkatan	59
8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	60
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	60
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	61
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
e. Upaya Peningkatan	62
9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	62
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	62
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	63
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	64
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	64
e. Upaya Peningkatan	65
10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	65
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	66

b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	66
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	67
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	68
e. Upaya Peningkatan	69
11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69
a. Perbandingan Realiasasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	70
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	71
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	71
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	72
e. Upaya Peningkatan	72
12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	73
a. Perbandingan Realiasasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	74
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	75
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	75

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	76
e. Upaya Peningkatan	76
13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan .	77
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	77
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	78
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	78
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	79
e. Upaya Peningkatan	79
14. Jumlah Desa Pangan Aman	79
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	79
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	80
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	80
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	81
e. Tindaklanjut Perbaikan	81
15. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	81
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	81
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	82

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	82
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	83
e. Tindaklanjut Perbaikan	83
16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	83
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	84
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	85
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	85
e. Tindaklanjut Perbaikan	85
17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	86
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	87
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	87

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	88
e. Tindaklanjut Perbaikan	88
18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	89
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	90
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	91
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	91
e. Tindaklanjut Perbaikan	91
19. Indeks Pelayanan Publik UPT	92
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	92
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	92
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	93
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	93
e. Tindaklanjut Perbaikan	93
20. Nilai AKIP UPT BPOM	93
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	94

b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	95
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	95
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	95
e. Tindaklanjut Perbaikan	95
21. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	96
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	96
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	96
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	97
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	97
e. Tindaklanjut Perbaikan	97
22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	98
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	98
b. Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	99
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	99
d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	100
e. Tindaklanjut Perbaikan	101

23.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	101
a.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	101
b.	Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	102
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	102
d.	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	103
e.	Tindaklanjut Perbaikan	103
24.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	104
a.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	104
b.	Perbandingan Kinerja Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025	105
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	105
d.	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	106
e.	Tindaklanjut Perbaikan	106
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	107
3.3	Realisasi Anggaran	117
3.3.1	Realisasi anggaran	117
3.3.2	Realisasi anggaran per Sasaran	121
3.3.3	Evaluasi dan Analisis Anggaran	123
3.3.4	Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran	123
BAB IV	PENUTUP	132

4.1	KESIMPULAN	132
4.2	SARAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Pegawai Loka POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	5
Tabel 2. Jenjang Jabatan Pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025	8
Tabel 3. Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	11
Tabel 4. Analisis Beban Kerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2025	14
Tabel 5. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis ...	19
Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan 2025	22
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	24
Tabel 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	27
Tabel 9. Kategori Penilaian Capaian Indikator Kinerja	32
Tabel 10. Kategori Penilaian Capaian Indikator Kinerja.....	32
Tabel 11. Range Tingkat Efisiensi	33
Tabel 12. Capaian Kinerja Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan	35
Tabel 13. Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2025	36
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	41
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	42
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	44
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	45
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	47
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	48
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	49
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	50
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	52
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	52
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	54
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	55

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	57
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	57
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	60
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	60
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	63
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	63
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	66
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	66
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	70
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	71
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	74
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	75
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	77
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	78
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	79
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	80
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	81
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	82
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	83
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	84
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	86
Table 47. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	87
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	89
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	90
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	92
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	92
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	95
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	95
Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	96
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	96

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	98
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	99
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	101
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	102
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan	104
Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	105
Tabel 62. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	107
Tabel 63. Realisasi Anggaran Per Indikator Tahun 2025	117
Tabel 64. Tabel Realisasi Anggaran per sasaran strategis TW II Tahun 2025	121
Tabel 65. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	123
Tabel 66. Tingkat Efisiensi IKU dan Anggaran TW II Tahun 2025	124
Tabel 67. Tingkat Efisiensi Kegiatan dan Anggaran TW II Tahun 2025	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya ..	3
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2025	5
Gambar 3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia	6
Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	7
Gambar 5. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13
Gambar 6 : Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan peredaran produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja yang sistematis dan terukur. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah penyusunan **Laporan Kinerja Interim** yang memuat capaian kinerja Loka POM selama periode **Triwulan II Tahun 2025**. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Triwulan II Tahun 2025 merupakan periode yang penting dalam menentukan arah dan strategi pelaksanaan program kerja di tahun berjalan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, diharapkan dapat dilakukan monitoring secara dini terhadap pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan sumber daya yang ada, guna memastikan tercapainya target kinerja tahunan secara optimal.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Interim ini juga merupakan bentuk akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada pimpinan BPOM dan pemangku

kepentingan lainnya, dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi wilayah cakupan pengawasan. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

WILAYAH KERJA

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.



Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

1. Luas Wilayah Kerja

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu 52.995,20 km² yang terdiri dari wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km² (80,94%) dan wilayah daratan hanya seluas 10.102,92 km² (19,06%). Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 81 pulau. Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 berdasarkan BPS Kab. Kepulauan Tanimbar dalam 2024 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Angka sebanyak 131.370 jiwa.

Luas Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu 72.426,58 km² yang terdiri dari wilayah laut seluas ± 63.793,43 km² (88,08%) dan wilayah daratan hanya seluas 8.633,15 km² (11,92%). Kabupaten Maluku Barat Daya juga merupakan daerah kepulauan jumlah pulau sebanyak 48 pulau termasuk pulau-pulau yang tidak didiami. Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan BPS Kab. Maluku Barat Daya dalam Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Angka 2024 sebanyak 93.766 jiwa.

2. Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar adalah 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ibukota Saumlaki dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ibukota Tiakur.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Wermaktian, Selaru, Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlabobar, Nirunmas, Kormomolin, Molu Maru. Adapun total jumlah desa pada 10 kecamatan di Kab. Kepulauan Tanimbar pada tahun 2024 sebanyak 89 desa/kelurahan. Sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki 17 Kecamatan kebanyakan terdiri dari Pulau-pulau kecil meliputi Wetar, Wetar Barat, Wetar Utara, Wetar Timur, PP. Terselatan, Kisar Utara, Kepulauan Romang, Letti, Moa Lakor, Lakor, Damer, Mdon Hyera, PP. Babar, Pulau Wetang, Babar Timur, Pulau Masela, Daweloor Dawera dengan total desa pada tahun 2024 sebanyak 118 desa/kelurahan.

Keadaan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 84,51% adalah lautan dengan pulau-pulau kecil yang tersebar dan belum dapat diakses melalui transportasi udara, sehingga pola transportasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan

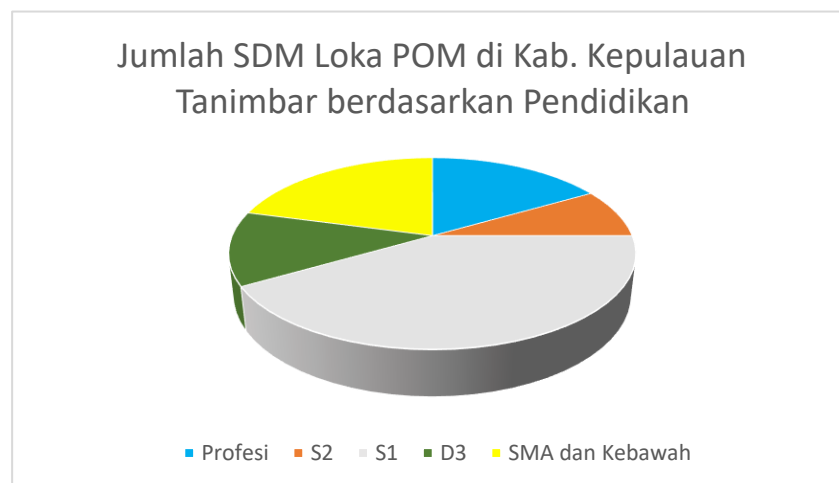
Tanimbar adalah 60% menggunakan transportasi laut dan 40% transportasi darat.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara optimal, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan tahun 2025 adalah 30 orang dengan rincian 18 Pegawai Negeri Sipil, 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 orang terbagi tenaga honorer dan outsourcing yang dibagi ke dalam beberapa fungsi

Tabel 1. Profil Pegawai Loka POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	Persentase (%)
Profesi	5	17
S2	1	3
S1	14	47
D3	5	17
SMA dan Ke bawah	5	17
Total	30	100



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2025

Dari Tabel 1 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang (17%) berpendidikan profesi, 1 orang (3%) berpendidikan S2, 14 orang (47%) berpendidikan S1, 5 orang (17%) berpendidikan D3 dan 5 orang (17%) berpendidikan SMA ke bawah.

Dikelompokkan berdasarkan usia pegawai, mayoritas pegawai Loka adalah generasi millenial yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan berdasar gender, jumlah pegawai pria pada tahun 2025 sebanyak 15 orang (50%) sebanding dengan pegawai wanita sebanyak 15 orang (50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin oleh Kepala Loka yang langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. Analisis Lingkungan Strategis

1. Isu Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 18 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 2 orang Tenaga Pramubakti dan 7 OS pada tahun 2025.

PNS di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi beberapa Fungsi, yaitu Fungsi Pengujian, Fungsi Informasi Komunikasi, Fungsi Tata Usaha,

Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Penindakan. Sedangkan Tenaga Pramubakti ditempatkan pada Fungsi Tata Usaha 2 orang, dan 7 orang tenaga kerja outsourcing terdiri dari 1 petugas administrasi, 2 Petugas Kebersihan, 3 Satpam dan 1 Supir.

Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 2. Jenjang Jabatan Pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	1
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	0
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	20
	1. PFM Muda	2
	2. PFM Pertama	11
	3. Pranata Komputer	1
	4. Pranta Keuangan APBN	1
	5. Perencana Ahli	1
	6. Pranata SDM	1
	7. PLB Terampil	1
	8. APK APBN	1
	9. Prakom Ahli	1
Jumlah		21

b. Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar masih sangat membutuhkan pengembangan kompetensi yang sesuai pada jabatannya masing-masing terutama untuk pengembangan kompetensi tingkat lanjutan atau yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Pada fungsi pemeriksaan misalnya, pengembangan kompetensi tingkat lanjutan / kesulitan tinggi yang telah diikuti membutuhkan praktek dilapangan sebagai pengalaman dan implementasi pengembangan kompetensi yang telah diikuti. Sedangkan di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar belum bisa mengimplementasikan hal tersebut karena belum terdapat Industri besar, sehingga dibutuhkan *Joint Inspection* di Balai / Balai Besar / Pusat untuk mengimplementasikan dan mendapatkan pengalaman mengenai hal tersebut dan ini berlaku untuk semua fungsi yang ada di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

c. Sarana Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar belum memadai dikarenakan belum adanya bangunan kantor Loka. Pada tahun 2025 *progress* pembangunan gedung kantor dan pelayanan publik Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dalam tahap pekerjaan lanjutan lantai 1, statusnya per tanggal 31 Desember 2024 adalah Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor dan pelayanan publik Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar akan dilakukan saat anggaran tersedia.

Sampai dengan tahun 2025 Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar masih menyewa sebuah rumah untuk dijadikan kantor sementara. Namun, terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja karena terbatasnya ruangan kerja yang belum didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai sehingga bisa menimbulkan risiko pencapaian kinerja yang kurang maksimal.

d. Teknologi

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tantangan yang sama dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) lainnya, terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi yang masih menjadi

hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau terpisah, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih belum merata di seluruh area pengawasan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jaringan internet, terutama di pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan. Koneksi yang tidak stabil dan terbatasnya akses terhadap teknologi digital menghambat proses pelaporan, koordinasi, dan pemantauan distribusi produk secara *real-time*. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan respon cepat terhadap potensi pelanggaran distribusi produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Dampak dari keterbatasan teknologi ini tidak hanya dirasakan dalam proses pengawasan, tetapi juga dalam upaya edukasi masyarakat. Penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital sulit menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan akses internet. Akibatnya, upaya edukasi sering kali harus dilakukan secara langsung, yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ekstra untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil.

e. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi organisasi, perlu dilakukan pemetaan dan analisis terhadap bidang yang dianggap mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana serta kelembagaan. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.

Tabel 3. Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
✓Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penerapan Reformasi Birokrasi	✓ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan ABK ✓ Kebutuhan kompetensi pegawai belum linear dengan sarana yang ada ✓ Belum tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai ✓ Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan belum optimal	✓ Dukungan sarana dan prasarana IT di daerah belum memadai ✓ Tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat beragam, sehingga masih diperlukan pemberdayaan secara konvensional ✓ Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat sulit menjangkau seluruh wilayah ✓ Akses transportasi terbatas. ✓ Perubahan cuaca yang berubah-ubah yang membuat perencanaan menjadi dinamis	✓ Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM dalam pengawasan Obat dan Makanan ✓ Kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat ✓ Kemitraan dengan stakeholder sudah terjalin dengan baik ✓ Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi iklan

✓ Lemahnya penegakan hukum.	produk Obat dan Makanan
	✓ Pendampingan terhadap UMKM diterima dengan baik

2. Isu Eksternal

a. Geografis

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah kepulauan termasuk pulau-pulau kecil sehingga dalam Pengawasan Obat dan Makanan sangat mempertimbangkan transportasi, cuaca dan kondisi geografis.

b. Transportasi

Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akses transportasi sangat terbatas, sampai dengan tahun 2025 akses transportasi udara ke Maluku Barat Daya merupakan pesawat perintis yang jadwalnya hanya 2 kali seminggu dengan kapasitas tempat duduk yang terbatas serta jadwal sering berubah sesuai dengan kebijakan maskapai. Akses transportasi laut jadwalnya tidak menentu karena tergantung rute tujuan dan waktu tunggu untuk dapat kembali ke tempat kedudukan memerlukan waktu paling lama 2 minggu atau 1 bulan sekali sehingga dari segi anggaran kurang efisien dan transportasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Transportasi darat yang berupa angkutan umum yang tidak melewati daerah kantor, sedangkan mobil sewa jumlahnya masih terbatas dengan tarif yang lumayan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan risiko Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah kerja Loka POM Tanimbar.

c. Iklim

Kondisi iklim di Kab. Kepulauan Tanimbar cepat berubah-ubah, namun selalu disertai dengan angin yang kencang. Perubahan cuaca yang berubah-ubah

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM / Balai Besar POM.

Akan tetapi, dengan kendala geografis yakni Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar merupakan daerah 3T, sehingga akses pengiriman tidak banyak pilihan dan menyebabkan pengiriman sampel ke Balai Uji memerlukan perencanaan yang matang dimana perlu adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau Petugas Pelni di Pelabuhan maupun ABK kapal bahkan dengan buruh angkut agar pengiriman sampel dapat terkirim sesuai jadwal kapal dan bisa tiba di Balai Koordinator sesuai dengan jadwal sampling.

Diharapkan kedepannya, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar sudah memiliki gedung dan fasilitas laboratorium sendiri untuk dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan tambahan pegawai sebanyak 14 (empat belas) ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2025.

Tabel 4. Analisis Beban Kerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2025

Jabatan	ABK hingga 2025	Jumlah Pegawai Hingga 2025	Gap
Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	11 (8 PNS, 3 P3K)	1
Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0
APK APBN	1	1	0

Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	0	1
Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	2	3
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
Total	30	21	9
Total Kebutuhan Pegawai (ASN) hingga 2025			30

Hasil analisis menunjukkan kebutuhan pegawai sebesar 30 orang, sedangkan realisasi hingga 2025 baru 21 orang, dengan gap sebanyak 9 orang. Tingkat pemenuhan pegawai mencapai 70%, menandakan masih kurangnya SDM untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada tahun 2025 realisasi indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target kinerja. Kerjasama dan kepedulian lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan utama dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan

kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

Selain itu, tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017, Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat dibuat turunan peraturan bupati yang mengatur hal tersebut agar pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Maka Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2029 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025.

RPJMN Tahun 2025–2029 merumuskan berbagai upaya transformatif yang sejalan dengan arah kebijakan Tahap I RPJPN 2025–2045. Transformasi tersebut mencakup berbagai bidang strategis: transformasi sosial; ekonomi; tata kelola pemerintahan; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan nasional; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

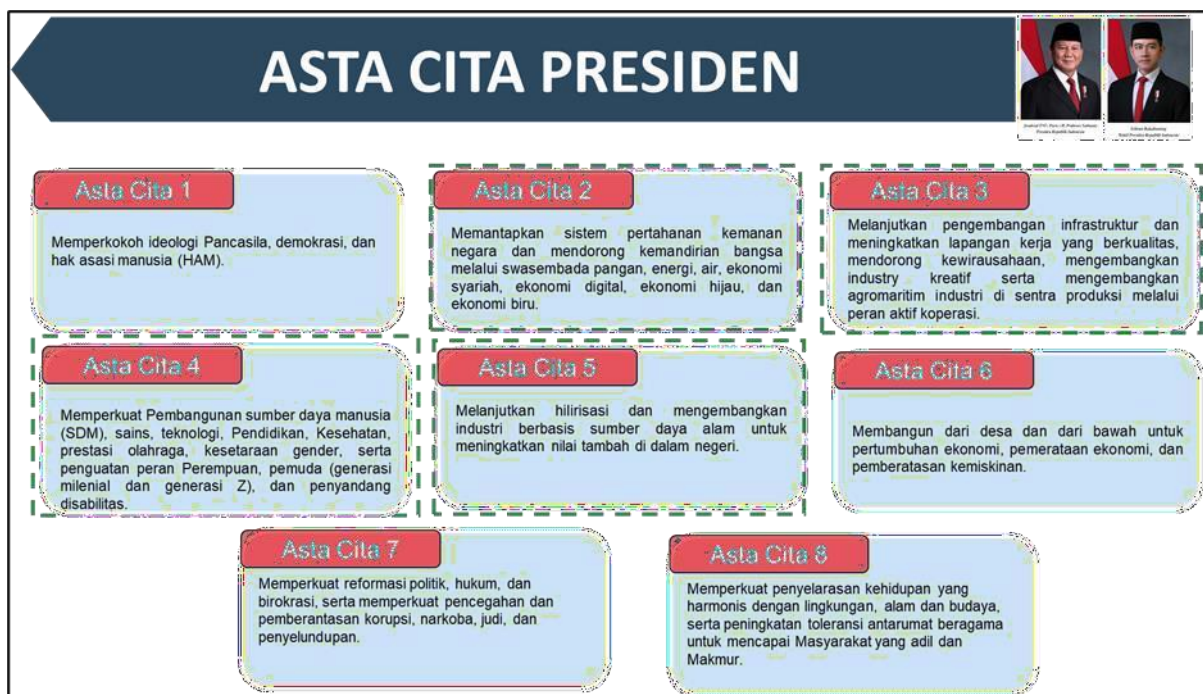
Langkah-langkah strategis dalam RPJMN 2025–2029 dirancang untuk mewujudkan visi Presiden masa bakti 2025–2029, yaitu: *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Strategi tersebut dituangkan dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang secara langsung merefleksikan delapan misi Presiden atau *Asta Cita*.

RPJMN ini juga memuat matriks pembangunan nasional, matriks kementerian/lembaga (K/L), serta arah pembangunan kewilayahan. Selain menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan

kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandangabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 6 : Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun berdasarkan Visi dan Misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan

mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan dapat mencapai sasaran strategis tersebut. Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM serta Indikator tiap Sasaran Strategis yang disesuaikan dengan tiap misi BPOM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator SS
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
			Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu
			Persentase PIRT yang aman dan bermutu
			Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
			Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta	Pelayanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
		Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
UMKM dalam rangka membangun yang produktif dan berdaya saing	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM
			yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan
			Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)

Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang dicanangkan dalam Renstra 2025-2029 telah disusun RKT Tahun 2025 dan PK Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai pada tahun 2025 ditetapkan dalam dokumen RKT dan PK Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	87

8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kepulauan Tanimbar	89
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8

2.3 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.282.785,00,- sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78	
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.60	
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	11

	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.87
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

efektif di wilayah kerja UPT			
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76.55
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.66
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2025

Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target di Triwulan I bulan 3, Triwulan II bulan 6, Triwulan III bulan 9, dan Triwulan IV bulan 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	103,232,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	75	75	75	75	44,150,000

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	0	0	100	8,830,000
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	35,320,000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78	78	78	78	42,929,000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	10,404,400
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	10,404,400

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	148,511,600
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	85	85	85	148,511,600
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.6	93.6	93.6	93.6	36,529,000
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.69	7.5	9.6	11	763,385,500
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.87	85.87	85.87	85.87	92,852,500
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	75	100	2	93,292,000

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Jumlah desa pangan aman	25	75	100	1	144,017,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	100	100	1	93,227,000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	51	91	91	26,500,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	65	155,356,000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	79	50	50	90	48,450,000

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	3.75	29,883,500
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	76.55	592,533,250
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	5.00	9,005,336,000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2.66	276,221,250
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	50	75	100	372,909,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 8. Kategori Penilaian Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% < x \leq 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata). Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 9. Kategori Penilaian Capaian Indikator Kinerja

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$70\% < x \leq 90\%$	
Kurang	$0\% < x \leq 70\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 50\%$	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau

lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\text{IE} = \% \text{ Capaian Output} / \% \text{ Rencana Capaian Input} \mid \text{IE} = 100\% / 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $\text{IE} \leq \text{SE}$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{TE} = \text{IE} - \text{SE} / \text{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 10. Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 sebagai penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + (1 - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan
3. dengan realisasi triwulan sebelumnya. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025:

Tabel 12. Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Dibandingkan dengan Target TW II (%)	Kategori	Capaian Dibandingkan dengan Target Tahun 2025 (%)	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	96,36	120.45	Tidak Dapat Disimpulkan	120.45	Tercapai/Melampaui
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	97.16	129.55	Tidak Dapat Disimpulkan	129.55	Tercapai/Melampaui
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A

	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91.67	107.84	Sangat Baik	107.84	Tercapai/ Melampaui
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78	78	70.97	90.98	Cukup	90.98	Akan Tercapai
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100.00	117.65	Sangat Baik	117.65	Tercapai/ Melampaui

	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	94.43	99.40	Cukup	99.40	Akan Tercapai
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	85	90.45	106.41	Sangat Baik	76.88	Akan Tercapai
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.6	93.6	99.15	105.93	Sangat Baik	93.56	Akan Tercapai
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5.23	7.5	7.87	104.93	Sangat Baik	71.55	Akan Tercapai
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	85.87	85.87	83.78	97.45	Cukup	97.45	Akan Tercapai

Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75.00	100.00	Baik	3.75	Perlu Upaya Keras
	Jumlah desa pangan aman	1	75	75.00	100.00	Baik	7.50	Perlu Upaya Keras
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	75.00	100.00	Baik	7.50	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	51	55.00	107.84	Sangat Baik	60.44	Perlu Upaya Keras
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	65	0	27.50	0.00	N/A	0.00	N/A

dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50.00	100.00	Baik	55.56	Perlu Upaya Keras
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75	0	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76.55	0	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	0	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.66	0	0.00	0.00	N/A	0.00	N/A
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	50	52.125	104.25	Sangat Baik	52.125	Perlu Upaya Keras
NKO					97,36	BAIK		

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai berdasarkan tabel diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1, Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT terdiri dari 10 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	80	96.36	120.45	Tidak Dapat Disimpulkan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
----------------------------------	--	--	--	--

Target Triwulan II dari indikator ini adalah 80% dengan realisasi 96.36% dan capaian 120.45% . Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II tidak dapat disimpulkan karena capaian lebih dari 110%. Target kinerja triwulan II untuk indikator ini telah tercapai, sehingga perlu dipertahankan di bulan – bulan selanjutnya

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96.36	120.45	Tercapai/Melampaui	

Realisasi indikator ini dibandingkan dengan target tahunan adalah 96.36% dan capaian 120.45% dengan kategori tercapai/melampaui. Kinerja ini telah melampaui target tahunan dan harus dipertahankan di triwulan berikutnya agar target tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan indikator ini disebabkan diantaranya oleh: Pelaksanaan sampling yang tepat sasaran melalui metode purposive sampling sesuai pedoman, Koordinasi yang baik antar tim teknis, mulai dari pengambilan sampel hingga pelaporan hasil, Kepatuhan terhadap alur tindak lanjut, termasuk pengujian dan pelaporan sesuai SOP.

Rekomendasi untuk indikator ini diantaranya adalah: Pertahankan standar operasional dan koordinasi lintas fungsi, Tingkatkan dokumentasi dan pelacakan tindak lanjut untuk audit dan pengendalian mutu, Pastikan pelatihan berkala bagi petugas pengawas agar tetap update terhadap peraturan dan teknik sampling terbaru.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pengawasan rutin sediaan farmasi yang terencana dan berbasis risiko, serta didukung sistem penanganan sampel yang tertib dari pengambilan hingga pelaporan. Kontribusi laboratorium dalam mendukung validasi hasil serta koordinasi yang baik antar tim teknis turut memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian kinerja mampu melampaui target yang ditetapkan. Program yang mendukung keberhasilan meliputi penyusunan rencana kerja dan jadwal pemeriksaan (Renlak) yang terstruktur dan realistis, serta adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten turut memperlancar pelaksanaan pengawasan di lapangan.

e. Upaya Peningkatan

Upaya peningkatan kinerja ke depan difokuskan pada peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap dinamika lapangan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci untuk

memastikan setiap kegiatan berjalan tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

2. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain : Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian, Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi, Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS, Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS, Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025**

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
-------------------	--------	-----------	-------------------------	----------------------------------

	TW II		TW II	TW II
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	97.16	129.55	Tidak Dapat Disimpulkan

Target Triwulan II dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 97.16% dan capaian 129.55%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II tidak dapat disimpulkan karena capaian lebih dari 110%. Target kinerja triwulan II untuk indikator ini telah tercapai, sehingga perlu dipertahankan di bulan – bulan selanjutnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	97.16	129.55	Tercapai/Melampaui	

Realisasi indikator ini dibandingkan dengan target tahunan adalah 97.16% dan capaian 129.55% dengan kategori tercapai/melampaui. Kinerja ini telah melampaui target tahunan dan harus dipertahankan di triwulan berikutnya agar target tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian indikator ini, yang mencapai 97.16% dari target 75% (129.55%), disebabkan oleh pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel yang tepat sasaran sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut yang cepat dan sesuai ketentuan. Koordinasi yang solid antar tim dan kesiapan sarana pendukung turut memperlancar proses. Ke depan, untuk mempertahankan kinerja, perlu dilakukan peningkatan ketepatan waktu pelaporan dan pelacakan hasil tindak lanjut, serta pembaruan pedoman teknis secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi lapangan.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pengawasan pangan olahan yang berjalan sesuai jadwal menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan indikator ini. Kegiatan pengambilan sampel dilakukan dengan dasar evaluasi risiko yang jelas, dan pengujian laboratorium dilaksanakan sesuai standar. Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil yang tidak memenuhi syarat dilakukan secara menyeluruh melalui pembinaan, koordinasi lintas sektor, dan penarikan terhadap sampel TMS.

e. Upaya Peningkatan

Untuk meningkatkan capaian yang telah baik ini, upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kompetensi petugas pengambil dan penguji sampel, penyusunan rencana pelaksanaan yang fleksibel sesuai kondisi lapangan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi

terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, serta perencanaan yang lebih matang berbasis data historis dan pemetaan risiko.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	-	-	-

Target untuk indikator ini ada di akhir tahun dan tidak ada realisasi di TW II.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-

Target untuk indikator ini ada di akhir tahun dan tidak ada realisasi di TW II.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Juni 2025 belum terdapat kasus KLB di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar sehingga sampai dengan bulan Juni 2025 belum terdapat realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Tindakan Melakukan koordinasi dan atau advokasi dengan Dinkes selaku penanggung jawab penanganan KLB dan (2) Mengikuti pelatihan secara mandiri (ideas) untuk meningkatkan kompetensi (pengambilan sampel pangan KLB)

e. Upaya Peningkatan

Untuk upaya peningkatan yakni berupa koordinasi dengan lintas sektor terkait serta mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri melalui IDEAS.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 19.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.67	107.84	Sangat Baik

Target Triwulan II dari indikator ini adalah 85% dengan realisasi 91.67% dan capaian 107.84%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II sangat baik karena capaian lebih dari 100%. Target kinerja triwulan II untuk indikator ini telah tercapai, sehingga perlu dipertahankan di bulan – bulan selanjutnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.67	107.84	Tercapai/Melampaui	

Realisasi indikator ini dibandingkan dengan target tahunan adalah 91.67% dan capaian 107.84% dengan kategori tercapai/melampaui. Kinerja ini telah melampaui target tahunan dan harus dipertahankan di triwulan berikutnya agar target tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 91.67% dari target 85%, menghasilkan capaian 107.84%. Keberhasilan ini didukung oleh ketepatan dalam pemilihan sampel PIRT berisiko berbasis analisis risiko, pelaksanaan pengujian sesuai pedoman, serta respons cepat terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat. Koordinasi aktif dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan DPMPTSP juga mempercepat proses tindak lanjut. Ke depan, perlu peningkatan pada aspek ketepatan waktu pelaporan dan penyusunan dokumentasi tindak lanjut yang lebih sistematis sebagai bagian dari penguatan pengendalian mutu.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan ini ditopang oleh program pengawasan PIRT yang dilaksanakan secara rutin dan berbasis risiko, serta tersedianya pedoman teknis yang jelas. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan tepat waktu, dan hasilnya segera ditindaklanjuti melalui pembinaan langsung kepada pelaku usaha maupun melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pelibatan lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan tindak lanjut berjalan optimal dan tepat sasaran.

e. Upaya Peningkatan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengujian dan pembinaan, penyusunan renlak yang lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi lapangan, penguatan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut kasus TMS, serta perencanaan kegiatan berbasis data historis agar intervensi lebih tepat sasaran

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi,

saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78,00	70,97	90,98	BAIK

Target Triwulan I dari indikator ini adalah 78,00% dengan realisasi 70,97% dan capaian 90,98%. Sehingga Kesimpulan untuk capaian terhadap target triwulan II **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	78,00	70,97	90,98	Akan Tercapai	

Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
---	--	--	--	--	--

Realisasi indikator ini dibandingkan dengan target tahunan adalah 70,97% dan capaian 90,98% dengan kategori akan tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator ini sebesar 70,97% dari target 78% (90,98%), dengan kategori “Baik” dan akan tercapai. Penyebab utamanya adalah terdapat 9 surat tindaklanjut yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha baik karena keterbatasan kapasitas, kurangnya pemahaman atas urgensi temuan, atau belum optimalnya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pihak. Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan komunikasi formal dan informal dengan stakeholder serta penegasan tanggung jawab tindak lanjut melalui surat resmi dan forum koordinasi.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pengawasan sudah berjalan dan menghasilkan rekomendasi, namun tidak seluruhnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program internal UPT belum sepenuhnya diimbangi oleh komitmen eksternal dari stakeholder, terutama pemerintah daerah dan pelaku usaha. Belum adanya sistem pelaporan balik (feedback) yang konsisten juga menghambat pelacakan tindak lanjut atas rekomendasi.

e. Upaya Peningkatan

Untuk mendorong pencapaian target, diperlukan dilakukan upaya melalui penguatan komunikasi hasil pengawasan yang lebih jelas dan berbasis risiko, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyampaian rekomendasi yang spesifik dan terukur. Selain itu, dilakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan, pemberian edukasi atau pendampingan bagi stakeholder yang membutuhkan, serta pemberian apresiasi bagi yang patuh dan teguran bagi yang tidak

menindaklanjuti sesuai ketentuan. Upaya ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif stakeholder dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	0,00	0,00	KURANG

Target Triwulan II dari ini 87,00% dengan realisasi 0,00%. Sehingga Kesimpulan capaian terhadap target triwulan II masih kurang. Target kinerja triwulan II untuk indikator ini belum tercapai sama sekali, sehingga diperlukan upaya perbaikan atau percepatan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut agar target pada triwulan berikutnya dapat dikejar.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Indikator ini 00,00 dan belum mencapai dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 87,00. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 00,00. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini belum menunjukkan capaian (0%) dari target 87%, disebabkan oleh keterbatasan jumlah sarana produksi sediaan farmasi (sarprod) di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sarprod yang menjadi objek pengawasan justru berada di luar wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang akses transportasinya terbatas. Jadwal pesawat yang selalu penuh serta frekuensi kapal yang minim menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Untuk perbaikan ke depan, perlu disusun strategi pelaksanaan pengawasan yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah, seperti menjadwalkan inspeksi terintegrasi saat sarana transportasi tersedia dan melakukan pendekatan koordinatif lebih awal dengan pihak sarana.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pengawasan telah dirancang namun pelaksanaannya terganggu karena keterbatasan geografis dan dukungan transportasi. Kegiatan pendukung seperti perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan sudah dilakukan, namun tidak didukung dengan infrastruktur dan akses mobilisasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan logistik, terutama untuk wilayah dengan karakteristik kepulauan terpencil.

e. Upaya Peningkatan

Untuk meningkatkan capaian ke depan, perlu dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan transportasi, serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak sarana produksi untuk penjadwalan inspeksi yang realistis. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah sasaran juga perlu diperkuat untuk memfasilitasi dukungan transportasi dan logistik. Jika memungkinkan, pengawasan jarak jauh (remote audit) dapat dijadikan alternatif sementara, sambil menunggu kesempatan inspeksi fisik secara langsung

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: Ketepatan waktu tindak lanjut, Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Target Triwulan II ini 85,00% dengan realisasi 100,00%. Sehingga kesimpulan capaian terhadap target triwulan II tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Tercapai/Melampaui	
--	-------	--------	--------	--------------------	---

Realisasi Indikator ini 100,00 dan telah tercapai/melampaui dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 85,00.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja indikator pada Triwulan II menunjukkan nilai realisasi 100,00% dari target 85,00%, namun dikategorikan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena seluruh sarana produksi yang diperiksa tidak menghasilkan rekomendasi tindak lanjut. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pembinaan sebelumnya, di mana pelaku usaha telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketentuan produksi pangan olahan. Penyebab keberhasilan ini antara lain adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi, serta efektivitas komunikasi dan pendampingan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II turut didukung oleh beberapa program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan secara terarah. Salah satunya adalah kegiatan pembinaan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan, khususnya UMKM, yang dilakukan secara langsung maupun daring. Kegiatan ini memberikan pemahaman teknis dan regulasi kepada pelaku usaha

terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), sehingga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kegiatan pengawasan rutin dan pengawasan berbasis risiko juga berperan penting dalam mengarahkan prioritas pemeriksaan ke sarana yang relevan, meskipun pada Triwulan II sebagian besar sarana yang diperiksa menunjukkan hasil sesuai ketentuan, sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan. Program koordinasi lintas sektor dan pendampingan teknis juga mendukung pemenuhan standar mutu oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari sinergi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang konsisten, meskipun dari sisi pengukuran kinerja substansi, hasilnya dikategorikan tidak dapat disimpulkan karena tidak ada tindak lanjut yang dapat dinilai.

e. Upaya Peningkatan

Upaya peningkatan kinerja ke depan akan difokuskan pada optimalisasi strategi pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan sarana produksi yang memiliki riwayat ketidaksesuaian atau belum pernah diawasi, serta pemutakhiran data profil sarana untuk mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, akan dilakukan peningkatan intensitas pembinaan teknis kepada pelaku usaha guna menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penguatan dokumentasi hasil pengawasan, termasuk pada kondisi tanpa temuan, serta pengembangan sistem pemantauan tindak lanjut secara digital juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa indikator dapat diukur secara substansi dan akurat, serta mencerminkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana sediaan farmasi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian (GFK, apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Pengawasan di sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik

sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	94,43	99,40	BAIK

Target Triwulan II dari indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan target 95,00% dengan realisasi 94,43%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	95,00	94,43	99,40	Akan Tercapai	

sesuai ketentuan					
------------------	--	--	--	--	--

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan realisasi sebesar 94,43% dari target tahunan sebesar 95,00%, atau setara dengan capaian 99,40% terhadap target. Meskipun realisasi sedikit di bawah target tahunan, capaian ini dikategorikan “Akan Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan hampir optimal, mencerminkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut yang hampir seluruhnya sesuai ketentuan, serta komitmen yang kuat dalam memastikan distribusi sediaan farmasi dilakukan secara aman, legal, dan memenuhi standar mutu yang berlaku.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 94,43% atau 99,40% terhadap target tahunan menunjukkan kinerja yang hampir optimal, dengan kategori “Akan Tercapai”. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan perencanaan, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, termasuk pelaku distribusi dan instansi pengawasan. Meskipun belum mencapai target tahunan secara penuh, hal ini lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta penyesuaian terhadap prioritas kegiatan yang bersifat insidentil. Untuk penyempurnaan ke depan, perlu dilakukan penyesuaian strategi pemeriksaan berbasis risiko agar lebih efisien, peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan secara lebih real-time. Selain itu, diperlukan optimalisasi waktu dan sumber daya pada triwulan berikutnya agar target tahunan dapat dicapai sepenuhnya.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan meliputi penyusunan rencana kerja dan jadwal pemeriksaan (Renlak) yang terstruktur dan realistis, serta adanya

koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten turut memperlancar pelaksanaan pengawasan di lapangan. Namun, capaian kinerja juga mengalami hambatan akibat beberapa faktor. Efisiensi anggaran yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 berdampak pada berkurangnya jumlah fasilitas yang dapat diperiksa, sehingga target kinerja harus disesuaikan. Keterlambatan dalam penyesuaian rencana kerja setelah adanya perubahan anggaran turut memperlambat pelaksanaan kegiatan.

e. Upaya Peningkatan

1. Penyusunan dan Penyesuaian Renlak yang Adaptif

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (Renlak) yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan anggaran, sehingga tetap dapat mengoptimalkan pemeriksaan sarana sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya

Mengoptimalkan keterlibatan seluruh anggota tim pemeriksa dan memanfaatkan tenaga teknis lain secara kolaboratif untuk memperluas cakupan pemeriksaan meskipun dengan keterbatasan SDM. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap progres kegiatan pemeriksaan untuk mendeteksi hambatan lebih dini dan segera melakukan penyesuaian atau perbaikan.

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa

Sarana distribusi pangan olahan yang dimaksud terdiri atas sarana seperti gudang distributor, subdistributor, toko grosir, minimarket, supermarket, dan sarana retail lainnya yang berizin maupun belum memiliki izin. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip distribusi pangan yang baik. Diharapkan produk pangan olahan yang didistribusikan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terjamin mutu, keamanan, dan keamanannya sebelum sampai ke tangan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85,00	90,45	106,41	Sangat Baik

Target Triwulan II dari indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa, target 85,00% dengan realisasi 90,45%, capaian terhadap target 106,41%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II “Sangat Baik” dimana menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan untuk memastikan mutu dan keamanan pangan tetap terjaga. Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa pada TW II sebanyak 69 sarana.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85,00	90,45	106,41	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa Triwulan II sebesar 90,45 dan telah mencapai dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan

sebesar 85,00. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 106,41 dengan kategori "Tercapai/Melampaui".

Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana distribusi Pangan Olahan di Triwulan II Tahun 2025 sudah berjalan dengan sangat baik.

Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan pangan olahan yang telah direncanakan, serta mencerminkan kesiapan dan kesigapan petugas dalam menjangkau sarana distribusi pangan olahan secara optimal. Warna notifikasi hijau berbentuk segitiga mengindikasikan bahwa kondisi kinerja berada pada kategori "**Tercapai/Melampaui**", sehingga tidak diperlukan tindakan korektif khusus pada indikator ini untuk saat ini.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa yang mencapai 106,41% dari target disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu terjadi peningkatan jumlah pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Mei, kegiatan pemeriksaan dilaksanakan dengan total 29 sarana yang diperiksa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sarana yang melakukan pelanggaran berulang, menunjukkan perlunya pengawasan lanjutan dan pembinaan yang lebih intensif guna mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa tidak terlepas dari kontribusi beberapa program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Program Intensifikasi Pengawasan Pangan, kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan sarana distribusi pangan. Melalui intensifikasi, pengawasan difokuskan pada sarana yang berisiko tinggi serta dilakukan dengan frekuensi dan cakupan yang lebih luas.

2. Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan instansi terkait
Dukungan dari pemangku kepentingan lokal membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan, terutama dalam hal akses ke lokasi pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

e. Upaya Peningkatan

Upaya peningkatan kinerja untuk memenuhi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa:

1. Melakukan perencanaan dan pendataan untuk melaksanakan pemeriksaan ke wilayah yang belum pernah dilakukan pengawasan.
2. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengelola Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan
3. Melakukan pemeriksaan sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun, dan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan regulasi
4. Koordinasi bersama tim pemeriksaan terkait inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan jumlah sarana distribusi yang melaksanakan kegiatan distribusi pangan olahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Bimbingan Teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi pangan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemandirian pelaku usaha dalam upaya penjaminan mutu pangan olahan sesuai peraturan yang berlaku sampai produk tersebut diterima konsumen

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan mencakup berbagai media promosi seperti media cetak, elektronik, luar ruang, dan digital yang digunakan untuk memasarkan produk kepada masyarakat. Pengawasan terhadap iklan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan. Diharapkan dengan adanya pengawasan ini, masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk, sehingga perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen dapat terjamin.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,60	99,15	105,93	SANGAT BAIK

Target Triwulan II dari indikator kinerja Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, target 93,60% dengan realisasi 99,15%, capaian terhadap target 105,93%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan I “Sangat Baik” karena melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan berjalan dengan efektif dan bahwa mayoritas iklan yang diawasi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- Tidak mengandung klaim berlebihan,
- Tidak menyesatkan masyarakat,

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk secara benar dan bertanggung jawab.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
-------------------	--------	-----------	-------------------------	----------------------------------	------------------

	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,60	99,15	105,93	Tercapai/Melampaui	

Target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 93,60%, sedangkan realisasi capaian hingga akhir Triwulan II mencapai 99,15%, atau 105,93% terhadap target tahunan. Capaian ini dikategorikan sebagai “Tercapai/Melampaui” yang mencerminkan pelaksanaan pengawasan yang optimal, serta adanya kepatuhan yang cukup baik dari pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan peraturan periklanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan iklan telah dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengawasan berjalan terarah dan sesuai sasaran.
2. Proses pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam pedoman pelaporan, sehingga mendukung ketertelusuran dan validitas data capaian.
3. Rencana pelaksanaan pengawasan iklan telah disusun dengan mempertimbangkan proporsi media sesuai pedoman, sehingga alokasi pengawasan lebih efektif dan mencakup media yang relevan dengan tren penyebaran iklan saat ini.

Meskipun capaian telah melampaui target, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan berikut:

- Optimalisasi pengawasan iklan berbasis digital, khususnya untuk media sosial dan platform daring yang bersifat dinamis dan cepat berubah, melalui pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis sistem otomatis atau kecerdasan buatan (AI).
- Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan media massa, asosiasi industri, dan penyedia platform digital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi periklanan.
- Peningkatan sistem pelaporan internal, agar lebih ringkas, real-time, dan terintegrasi, guna mempermudah monitoring capaian serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran.
- Evaluasi rutin terhadap efektivitas pengawasan dan rencana pelaksanaan, agar rencana ke depan lebih adaptif terhadap tren media dan pola pelanggaran yang berkembang.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang Triwulan I Tahun 2025. Beberapa program/kegiatan yang berkontribusi signifikan antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Pengawasan Iklan (Renlak Iklan)

Penyusunan Renlak yang disesuaikan dengan pedoman dan mempertimbangkan proporsi media yang dominan digunakan oleh pelaku usaha, memungkinkan pengawasan lebih tepat sasaran dan efisien.

2. Kegiatan pemantauan iklan secara rutin dan terjadwal

Pengawasan iklan dilakukan secara periodik terhadap berbagai media (media cetak, elektronik, online, dan media sosial), sehingga potensi pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Kombinasi kegiatan tersebut telah mendorong tercapainya realisasi indikator di atas target, sekaligus memperkuat sistem pengawasan iklan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan media saat ini.

e. Upaya Peningkatan

Untuk menjaga konsistensi capaian dan mendorong peningkatan kualitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat, agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat serta menjadi salah satu sumber informasi pengawasan yang efektif.
2. Evaluasi berkala terhadap efektivitas Renlak dan pelaksanaan pengawasan, agar dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan dinamika media, pola pelanggaran, dan tren konsumsi iklan oleh masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, baik dalam aspek regulasi, penilaian materi iklan, maupun literasi digital, guna mendukung pengawasan yang adaptif dan berbasis data.

Sasaran Kegiatan 3 : Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 3, Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

SKL Loka POM (Tingkat 1) dan Balai POM (Tingkat 2) terdiri atas 3 (tiga) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan; dan
- c. Standar Kompetensi Laboratorium

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium

pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya serta pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,50	7,87	104,93	SANGAT BAIK

Target Triwulan II dari indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, target 7,50 dengan realisasi 7,87, capaian terhadap target 104,93%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan II “Sangat Baik”.

Penerapan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) dalam rangka pemenuhan target SKL di Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar telah terlaksana dengan monitoring dan evaluasi pada Triwulan 2. Pada umumnya terdapatnya efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan Standar Ruang Lingkup pada pemenuhan nilai SKL, karena laboratorium rata-rata masih mempunyai fasilitas terutama Tes Kit yang didapat tahun 2024. Selain itu peningkatan pemenuhan SKL dapat dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan personel penguji dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai ketentuan	11	7,87	70,55	Akan Tercapai	

Target tahunan yang telah ditetapkan dengan nilai 11, sedangkan realisasi capaian hingga akhir Triwulan II sebesar 7,87 atau 70,55% terhadap target tahunan. Capaian ini dikategorikan sebagai “Akan Tercapai”, meskipun realisasi belum optimal, terdapat peluang pencapaian target secara penuh hingga akhir tahun apabila dilakukan upaya percepatan, optimalisasi peran laboratorium, serta peningkatan terhadap komponen-komponen pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan capaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan uji cepat (rapid test) terhadap dua sampel obat, yaitu Metilprednisolon dan Asam Mefenamat. Hal ini menunjukkan komitmen dalam pengawasan mutu obat secara berkelanjutan.
2. Belum tersedianya tempat khusus untuk pemasangan lampu UV mengakibatkan penguji harus memegang lampu secara manual saat pengujian, yang dapat mengurangi efisiensi dan kenyamanan kerja.
3. Sirkulasi udara di laboratorium mini masih kurang optimal. Lemari asam portable tidak berfungsi maksimal dalam mengeluarkan udara dari area laboratorium. Oleh karena itu, dibutuhkan alat exhaust portable tambahan yang dapat membantu menyaring dan mengeluarkan udara secara lebih efektif.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi):

1. Menyediakan tempat khusus untuk pemasangan lampu UV pada area kosong di laboratorium mini pada Triwulan III agar proses pengujian lebih ergonomis dan efisien
2. Mengupayakan pengadaan exhaust portable yang mampu menyaring dan mengalirkan udara keluar dari laboratorium, guna meningkatkan kualitas sirkulasi udara dan keselamatan kerja.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Perencanaan Kegiatan Pengujian

Telah dilakukan penyusunan rencana pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pada pengujian pangan, khususnya terkait identifikasi kandungan Methanil Yellow melalui kegiatan mobil laboratorium (mobling) pada Triwulan II.

2. Pelaksanaan Verifikasi dan Pengujian

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan verifikasi Rapid Test Kit Obat terhadap dua jenis sampel, yaitu Metilprednisolon dan Ibuprofen.

e. Upaya Peningkatan

1. Peningkatan Kapasitas SDM Penguji:

Dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi personil penguji, khususnya dalam penguasaan metode uji yang digunakan pada pengujian pangan dan obat, untuk meningkatkan akurasi serta kecepatan hasil pengujian.

2. Optimalisasi Perencanaan dan Monitoring Kegiatan:

Memperkuat sistem perencanaan kegiatan dengan pendekatan berbasis risiko serta meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan, guna memastikan ketercapaian target secara tepat waktu dan sesuai standar mutu.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Sarana Penunjang

Meningkatkan pemanfaatan sarana mobil laboratorium (mobling) serta memperbarui perangkat Rapid Test Kit sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan lapangan, agar kegiatan pengawasan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Sasaran Kegiatan 4, Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi : 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Untuk Survei KIE langsung ke masyarakat menggunakan 4 indikator yaitu: a) narasumber dan petugas kie, b) konten dan informasi, c) pemahaman

dan d) manfaat. Sementara evaluasi KIE medsos juga menggunakan 4 indikator yaitu:
a) sumber informasi, b) konten/informasi, c) pemahaman dan d) manfaat

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima KIE melalui media sosial atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW I
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,87	83,68	97,45	Cukup

Target Triwulan II dari Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah sebesar 85,87 dengan nilai realisasi sebesar 83,68 sehingga diperoleh capaian terhadap target Triwulan II sebesar 97,45 yang masuk dalam kategori Cukup.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,87	83,68	97,45	Akan Tercapai	

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan II sebesar 83,68 dan mendekati target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 85,87. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 97,45 dengan kategori capaian Akan Tercapai . Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2025 belum mencapai target, dengan kategori Cukup. Penyebab kegagalan indikator kinerja ini karena Survey KIE medsos pada tahun 2025 terpisah dan indeks efektivitas KIE merupakan hasil rata-rata dari nilai survey efektifitas KIE tatap muka dan media. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

1. Indikator pemahaman audiens baik pada KIE Medos dan KIE Tatap Muka rendah masing-masing 72,727 dan 75,481, dimana pada KIE

Tatap Muka, mayoritas peserta memiliki latar belakang pendidikan lulusan SD dan SMP.

2. Jumlah responden pada survey KIE medsos lebih sedikit dibandingkan dengan KIE tatap muka. Dari hasil analisis penyebab kegagalan diketahui nilai indikator pemahaman dan manfaat KIE pada survey KIE medsos paling rendah dibandingkan yang lain masing-masing 72.727 dan 73.21 maka dapat direkomendasi tindaklanjut yang dapat dilakukan berupa penambahan jumlah responden dan membuat produk KIE untuk medsos dengan tema yang berulang dengan desain yang berbeda.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil analisis penyebab kegagalan, terdapat 2 faktor kegagalan dengan program yang menunjang keberhasilan yang akan dilakukan yakni:

1. Untuk nilai indikator pemahaman KIE Tatap muka yang sebesar 75,481 karena faktor tingkat Pendidikan peserta KIE, maka dapat direkomendasikan untuk pelaksanaan KIE selanjutnya materi akan dikemas dengan lebih menarik serta menggunakan Bahasa yang lebih sederhana sehingga materi dapat dipahami oleh audiens.
2. untuk nilai indikator pemahaman dan manfaat KIE pada survey KIE medsos paling rendah dibandingkan yang lain, maka dapat direkomendasi tindaklanjut yang dapat dilakukan berupa penambahan jumlah responden dan membuat produk KIE untuk medsos dengan tema yang berulang dengan desain yang berbeda.

e. Upaya Peningkatan

Terdapat dua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ini yaitu:

1. Membuat materi KIE yang lebih menarik dan menggunakan bahasa sederhana.
2. Menambah jumlah responden pada survey efektivitas KIE medsos. Dengan membuat produk kie medsos dengan tema yang berulang dengan desain yang bervariasi agar pemahaman dan manfaat dari KIE tersebut dapat tertanam pada responden dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Sosialisasi Keamanan Pangan bagi sekolah full-intervensi dan Sekolah Perluasan, (3) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan (4) Monitoring dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW I
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100,00	Baik

Target Triwulan II dari Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah sebesar 75,00 dengan nilai

realisasi sebesar 75,00 sehingga diperoleh capaian terhadap target triwulan sebesar 100,00 yang masuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	Akan Tercapai	

Realisasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II sebesar 75,00 dan belum mencapai target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 100,00 untuk 2 sekolah full-intervensi karena target indikator ini berupa progress. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 75,00 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja sampai dengan Juni mencapai 75,00% dari target triwulan sebesar 75,00%. Keseluruhan progress yang mencakup advokasi, sosialisasi keamanan pangan kepada sekolah full-intervensi dan sekolah perluasan, serta bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah telah terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keseluruhan progress pelaksanaan sesuai dengan target timeline yang ditetapkan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan terakhir dari program ini pada triwulan berikutnya.

e. Tindakan Perbaikan

Melakukan tahapan terakhir dari kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di triwulan berikutnya.

14. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan desa di daerah destinasi wisata. Adapun pemilihan lokus desa pangan Aman yang dipilih tahun ini oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar adalah desa dengan Lokus Stunting berdasarkan SK Lokus Stunting oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar.. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Tahapan program desa pangan aman yaitu (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (3) Bimtek Komunitas Desa, dan (4) Monitoring dan Evaluasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW I

Jumlah Desa Pangan Aman	75	75	100,00	Baik
-------------------------	----	----	--------	------

Target Triwulan II dari Indikator Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebesar 75,00 dengan nilai realisasi sebesar 75,00 sehingga diperoleh capaian terhadap target triwulan sebesar 100,00 yang masuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Jumlah Desa Pangan Aman	1	75,00	75,00	Akan Tercapai	

Target Triwulan II dari Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebesar 75,00 dengan nilai realisasi sebesar 75,00 dan belum mencapai target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 100,00 untuk 1 desa yang diintervensi karena target indikator ini berupa progress. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 75,00 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya dapat terpenuhi

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja sampai dengan Juni mencapai 75,00% dari target triwulan sebesar 75,00%. Keseluruhan progress yang mencakup advokasi, bimbingan teknis kader, dan bimbingan teknis komunitas telah terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keseluruhan progress pelaksanaan sesuai dengan target timeline yang ditetapkan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan terakhir dari program ini pada triwulan berikutnya.

e. Tindakan Perbaikan

Melakukan tahapan terakhir dari kegiatan Desa Pangan Aman di triwulan berikutnya.

15. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan pasar aman berbasis komunitas yaitu : (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Pelatihan Petugas Pasar, (3) Penyuluhan Komunitas Pasar, (4) Monitoring dan Evaluasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
-------------------	--------	-----------	-------------------------	----------------------------------

	TW II		TW II	TW I
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	75	75	100,00	Baik

Target Triwulan II dari Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 75,00 dengan nilai realisasi sebesar 75,00 sehingga diperoleh capaian terhadap target triwulan sebesar 100,00 yang masuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	1	75	75	Akan Tercapai	

Target Triwulan II dari Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 75,00 dengan nilai realisasi sebesar 75 dan belum mencapai target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 100,00 untuk 1 pasar yang diintervensi karena target indikator ini berupa progress. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 75,00 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya dapat terpenuhi

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja sampai dengan Juni mencapai 75,00% dari target triwulan sebesar 75,00%. Keseluruhan progress yang mencakup advokasi,

bimbingan teknis kader, dan bimbingan teknis komunitas telah terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keseluruhan progress pelaksanaan sesuai dengan target timeline yang ditetapkan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan terakhir dari program ini pada triwulan berikutnya.

e. Tindakan Perbaikan

Melakukan tahapan terakhir dari kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas di triwulan berikutnya.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Sasaran Kegiatan 5, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki target pendampingan sebanyak (1) UMKM dimana UMKM yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB).

Dalam pelaksanaanya, pendampingan UMKM berupa progres tahapan pendampingan yang meliputi sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha, bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik, pendampingan UMKM, serta pelaporan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	51,00	51,00	100	Baik

Target Triwulan II dari Indikator Kinerja Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu adalah sebesar 51,00 dengan nilai realisasi sebesar 51,00 sehingga diperoleh capaian terhadap target Triwulan II sebesar 100 yang masuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	91	51,00	56,04	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Triwulan II sebesar 51,00 dan masih jauh dari target yang ditentukan yakni sebesar 91,00. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 56,04 dengan kategori capaian Perlu Upaya

Keras. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Triwulan II tahun 2025 sudah sesuai dengan target dengan kategori baik yang disebabkan oleh pelaksanaan progress pendampingan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan pendampingan ke pelaku usaha pada bulan Juli

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setelah dilakukan bimtek cppob, selanjutnya adalah pendampingan umkm pangan olahan yang telah berkomitmen untuk mendapatkan izin penerapan cppob dan izin edar di tahun ini

e. Upaya Peningkatan

Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dengan cara visitasi ke sarana produksi, pendampingan melalui WA, atau melalui kanal komunikasi lainnya agar sarana dan produk pangan yang diproduksi memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.

Sasaran Kegiatan 6 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Sasaran Kegiatan 6, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan, di mana bukti-bukti yang cukup telah ditemukan untuk mencurigai seseorang melakukan tindak pidana dalam bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan masuk dalam ruang lingkup kegiatan dari penindakan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar**

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	2,75	0,00	Kurang

Target Triwulan II dari indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT target 0,00% dengan realisasi 2,75%. Sehingga Kesimpulan untuk target triwulan 2 berkategori kurang karena <70%.

Perkara Carryover Tahun 2024 hingga akhir Juni 2025 masih menunggu tindak lanjut tahap 1, sehingga belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Target perkara tahun 2025 belum tercapai di Triwulan II dikarenakan asas ultimum remidum, sehingga sarana yang melanggar masih diprioritaskan untuk diberi

pembinaan/peringatan. Sebagaimana besar sarana yang telah diberi peringatan keras, sudah tidak lagi melakukan pelanggaran; serta nilai ekonomi dari sarana yang melakukan pelanggaran sangat kecil, hanya sekitar Rp100.000,- s.d. Rp300.000,-;

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65,00	2,750	42,31	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II sebesar 00,00 dan belum mencapai dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 65,00. Capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 42,31 dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan II tahun 2025 belum bisa dinilai, penilaian

dilakukan di Triwulan IV dan capaian pada Triwulan II 0%. Target penindakan hanya 1 pada tahun 2025, dan masih terdapat perkara yang carryover pada tahun 2024 yaitu 4 perkara.

Penyebab perkara carryover 2024 masih belum bisa diselesaikan karena masih menunggu tindak lanjut tahap 1 dari jaksa sehingga belum bisa melanjutkan ke tahap setelahnya. Target perkara tahun 2025 belum tercapai karena diterapkan Asas ultimum remidum yaitu sarana yang melanggar masih diprioritaskan untuk diberi pembinaan/peringatan. Sebagian besar sarana yang telah diberi peringatan keras, sudah tidak lagi melakukan pelanggaran. Selain itu, nilai ekonomi dari sarana yang melakukan pelanggaran sangat kecil, hanya sekitar Rp100.000,- s.d. Rp300.000,-

sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja di triwulan berikutnya, diantaranya berkomitmen untuk konsisten dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, intelijen, patroli siber, dan pencegahan. selain itu dalam menunjang upaya tersebut pegawai bagian penindakan diarahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Bidang Penindakan Obat dan Makanan.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kedepannya, yaitu diantaranya aktif melaksanakan berbagai upaya pemetaan dan pencarian kasus penindakan berupa operasi intelejen, patroli siber, dan penggalangan serta bekerjasama dengan Tim Pemeriksaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada target penindakan.

e. Tindakan Perbaikan

1. **Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan** agar proses tindak lanjut tahap 1 dapat segera dipercepat, sehingga tahapan proses penyidikan bisa berlanjut tepat waktu.
2. **Memperkuat monitoring terhadap perkara carryover** dari tahun sebelumnya, termasuk mempercepat penyelesaian dokumen berkas perkara pasca pengembalian SPDP agar tidak menghambat capaian kinerja tahun berjalan.

3. **Meningkatkan kegiatan intelijen, penyidikan, patroli siber, dan cegah tangkal** secara konsisten dan berkelanjutan agar potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini sebelum menjadi tindak pidana.
4. Mendorong **peningkatan kompetensi SDM penindakan** melalui pelatihan-pelatihan teknis yang relevan di bidang penindakan obat dan makanan, untuk memastikan aparat penindakan mampu menjalankan proses penyidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Sasaran Kegiatan 7, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) diantaranya:

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator ini merupakan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang meliputi kegiatan input rawan kasus, patroli siber dan profiling di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50,00	50,00	100,00	Baik

diselesaikan sesuai standar				
-----------------------------	--	--	--	--

Target Triwulan II dari indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yaitu 50,00% dengan realisasi 50,00% dan memiliki capaian 100,00%. Capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II masuk dalam kategori Baik.

Kegiatan input rawan kasus, patroli siber dan profiling pada Triwulan II telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan sudah dilaporkan melalui aplikasi <https://penindakan.pom.go.id/> (Rawan kasus dan Profiling) dan <https://inawebcrawler.id/> (Patroli Siber).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan	90,00	50,00	55,6	Perlu Upaya Keras	

sesuai standar					
----------------	--	--	--	--	--

Perbandingan target tahunan dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II yaitu 100,00% dan termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Capaian kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase keberhasilan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar karena telah adanya perencanaan dan penanggung jawab setiap bulan. Sehingga laporan dapat diinput secara tertib dan tidak melewati batas waktu input.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kedepannya, yaitu melaksanakan kegiatan profiling, patrol siber, dan input rawan kasus sesuai perencanaan yang telah disusun.

e. Tindakan Perbaikan

- 1. Memperkuat mekanisme perencanaan bulanan**, termasuk penetapan jadwal pelaporan dan penanggung jawab yang lebih rinci agar penginputan data tetap berjalan konsisten
- 2. Memperkuat koordinasi antar tim** dalam pengumpulan data dan penyusunan analisis agar pelaporan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga akurat dan berkualitas

Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran Kegiatan 8, Layanan Publik UPT yang Prima, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan bagian dari komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan terpercaya di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Indeks Pelayanan Publik UPT	00,00	00,00	00,00	-

Target Triwulan II dari indeks pelayanan publik UPT belum ada sehingga realisasi dan capaian target masih 0%. Pada triwulan 2 ini indeks pelayanan publik UPT sehingga belum bisa dibandingkan realisasinya karena belum dilaksanakan survey penilaian.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	0,00	00,00	Perlu Upaya Keras	

Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 memiliki target 3,75. Sedangkan ada triwulan 2 untuk realisasi indeks pelayanan publik UPT masih 0% atau belum ada realisasi. Sehingga kategori capaian masuk dalam kategori perlu upaya keras karena capaian kurang dari 70%. Capaian kinerja ini harus terlaksana dan ditingkatkan di triwulan berikutnya agar target triwulan / tahun berikutnya juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase keberhasilan Indeks Pelayanan Publik UPT dipengaruhi oleh penilaian hasil survei dari Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar terkait konsultasi publik, pelayanan sertifikasi, ataupun kegiatan sosialisasi melalui KIE.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kedepannya, yaitu melakukan pelayanan publik secara bersih, efektif, efisien, transparan, dan terpercaya.

e. Tindakan Perbaikan

melakukan pelayanan publik secara bersih, efektif, efisien, transparan, dan terpercaya

Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.

Sasaran Kegiatan 8, Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal, terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

20. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan

dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP, (5) Capaian Kinerja.

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Indikator ini, yaitu Nilai AKIP UPT diukur pada akhir tahun sesuai hasil penilaian dari Inpesktur Utama.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kriteria Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Nilai AKIP UPT	0,00	0,00	0,00	Kurang

Belum bisa dinilai, penilaian dilakukan di Triwulan IIV.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar**

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai AKIP UPT	76,55	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

Belum bisa dinilai, penilaian dilakukan di Triwulan IIV.

- c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)**
Belum bisa dinilai, penilaian dilakukan di Triwulan IV.
- d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Belum bisa dinilai, penilaian dilakukan di Triwulan IV.
- e. Tindakan Perbaikan**
Melakukan Rapat Evaluasi Internal (Rapat Kinerja) atau Rapat Bulanan (Notulen, Absen, Dokumentasi)

21. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Target NKA Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar di akhir tahun.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kriteria Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Nilai Kinerja Anggaran UPT	0,00	00,00	0,00	Kurang

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

Target nilai kinerja anggaran UPT untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar tahun 2025 yaitu 5,00.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penggunaan Aplikasi pengadaan baru yaitu Inaproc sehingga perlu adaptasi terhadap aplikasi tersebut. karena dalam pengaplikasiannya, Inaproc membutuhkan penyesuaian dalam penginputannya di Aplikasi Sakti. Sehingga hal ini menyebabkan adanya penurunan penyerapan anggaran akun belanja 53.

Sebagai upaya untuk peningkatan dan penyempurnaan kinerja, meningkatkan capaian kinerja di TW berikutnya, antara lain memahami dan mempelajari terkait penggunaan Aplikasi Inaproc serta memantau rencana pelaksanaan anggaran, melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala serta menyesuaikan semua tagihan dan melaksanakannya sesuai RPD.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT tidak terlepas dari adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Pimpinan dengan penanggung jawab dan pengelola anggaran pada masing-masing program / kegiatan. Monitoring secara aktif oleh petugas Monev terhadap nilai IKPA dan EKA khususnya terkait unsur-unsur meliputi: Monitoring Realisasi DIPA, Hal III DIPA, Capaian Keluaran Kegiatan (CKK), Efisiensi, Saldo Minus, revolving UP, data kontrak, dispensasi SPM, Kesalahan SPM, monitoring tagihan, rekonsiliasi keuangan dan monitoring penyampaian LPJ Bendahara, serta capaian output.

e. Tindakan Perbaikan

Menyelesaikan semua tagihan dan melaksanakan sesuai RPD sehingga dapat berdampak terhadap penyerapan anggaran.

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
- b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks;
- c. Identifikasi risiko;
- d. Analisis risiko;
- e. Evaluasi risiko;
- f. Mitigasi risiko;
- g. Reviu dan pemantauan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kriteria Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	00,00	0,00	Kurang

Indeks manajemen risiko UPT BPOM tidak terdapat target penilaian di TW 2. Hal tersebut dikarenakan penilaian dilakukan diakhir TW 4. Pada TW 2 telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko semester 1 tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi penilaian manajemen risiko tahun 2024 dari Inspektorat BPOM.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan
Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar**

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,66	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

Target indeks manajemen risiko di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar tahun 2025 yaitu 2,66. Hasil penilaian sebelumnya pada tahun 2024 yaitu 2,656 dengan tingkat maturitas Risk Aware. Pada triwulan 2 ini belum terdapat realisasi indeks manajemen risiko, dikarenakan penilaian dilakukan di akhir TW 4.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM agar meningkat di Tahun 2025 harus melakukan evaluasi hasil penilaian manajemen risiko tahun 2024 yaitu dengan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan reuiu Renstra dan mengidentifikasi mapping sasaran strategis secara relevan dan memadai;
2. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pelatihan terkait manajemen risiko secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai

baik melalui IDEAS maupun pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko unit kerja;

3. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko periode berikutnya, diantaranya dengan:
 - Melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh Sasaran Strategis dan kategori risiko;
 - Mengidentifikasi Kegiatan/Proses Bisnis yang terkait dengan sasaran strategis dengan mengacu pada dokumen formal seperti aktivitas pada SOP atau kegiatan pada dokumen RKA;
 - Mengidentifikasi satker/instansi/pihak lain yang berhubungan dengan risiko eksternal Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menuangkannya dalam formulir daftar risiko;
 - Melakukan pengujian aktivitas pengendalian atas risiko inheren dengan kriteria level risiko tinggi dan sangat tinggi (di atas selera risiko Badan POM) dan mendokumentasikannya secara memadai;
 - Mereviu kembali penulisan risk event agar lebih jelas dan spesifik;
 - Mereviu kembali dan mengidentifikasi atribut pengendalian yang relevandengan aktivitas pengendalian.
4. Melakukan pembahasan mengenai rencana aksi dan kendala atas capaian kinerja dihubungkan dengan manajemen risiko pada rapat evaluasi dan mendokumentasikannya secara memadai;
5. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan isu internal dan eksternal yang telah teridentifikasi dan mendokumentasikannya secara memadai;
6. Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap respon risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima oleh pimpinan.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM agar meningkat pada tahun 2025 yaitu dengan melakukan evaluasi hasil penilaian manajemen resiko tahun 2024. Melengkapi dokumen pendukung setiap kegiatan manajemen

risiko yang telah dilaksanakan. Melakukan update dan monitoring daftar resiko setiap semester dengan melibatkan pimpinan dan seluruh staff di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

e. Tindakan Perbaikan

Melakukan pengisian Daftar Risiko ke dalam SKP masing-masing pemiliki risiko setiap bagian (seksi)

Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.

Sasaran Kegiatan 9, Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal, terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi hanya 1 (satu) indikator yang memiliki target pada TW I 2025 yaitu:

23. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Untuk indikator ini perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kriteria Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	52,13	104,25	Sangat Baik

Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan. Target Triwulan I dari Indikator Target implementasi rencana aksi RB di

lingkup UPT adalah sebesar 50 dengan nilai realisasi sebesar 52,13 sehingga diperoleh capaian terhadap target triwulan sebesar 104,25 yang masuk dalam kategori Baik.

Untuk implementasi RB di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah terlaksana 85 rencana aksi dari target 88 rencana aksi yang terakumulasi hingga TW II.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	52,13	52,13	Perlu Upaya Keras	

Perbandingan target tahunan dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT Triwulan II sebesar 52,13 dan belum mencapai dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 100,00. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 52,13 dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan / tahun berikutnya agar target triwulan / tahun depan juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada Triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target TW II yang ditetapkan, dengan kategori Baik. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini karena Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah memiliki tim Reformasi Birokrasi yang bertugas menjalankan berbagai jenis rencana aksi yang telah direncanakan dan memastikan rencana aksi RB tersebut tetap terlaksana di setiap triwulannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati. Juga telah dibuat SK Inovasi tiap pokja dan tiap anggota pokja telah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Sebagai upaya untuk penyempurnaan kinerja dan mempertahankan capaian di tahun berikutnya, antara lain memonitoring pelaksanaan rencana aksi RB di Lingkungan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dan melaksanakan kegiatan - kegiatan atau inovasi- inovasi yang terkait dengan Refomasi Birokrasi sesuai timeline yang disepakati.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tidak terlepas dari adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang terlihat dari matriks rencana aksi masing - masing POKJA yang dimonitoring secara rutin, serta telah adanya SK RB dengan masing-masing POKJA sesuai fungsinya.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi pada TW II yakni Review SOP Mikro dan Sosialisasinya belum dapat terlaksana karena hingga saat ini, SOP Makro POM 02, POM 09, dan POM 10 masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dilaksanakan SOP Mikro maupun Sosialisasinya.

e. Tindakan Perbaikan

Beberapa rencana aksi TW II tidak dapat terlaksana yakni Review SOP Mikro dan Sosialisasinya belum dapat terlaksana karena hingga saat ini, SOP Makro POM 02, POM 09, dan POM 10 masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dilaksanakan SOP Mikro maupun Sosialisasinya. Selain itu, pemantauan akan pelaksanaan matriks RB juga

harus dipantau setiap bulannya untuk memonitoring dan mengevaluasi rencana aksi yang telah disusun dan dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.

Sasaran Kegiatan 9, Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal, terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi hanya 1 (satu) indikator yang memiliki target pada TW I 2025 yaitu:

24. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Untuk indikator ini perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kriteria Capaian Terhadap Target
	TW II		TW II	TW II
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	52,13	104,25	Sangat Baik

Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan. Target Triwulan I dari Indikator Target implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah sebesar 50 dengan nilai realisasi sebesar 52,13 sehingga diperoleh capaian terhadap target triwulan sebesar 104,25 yang masuk dalam kategori Baik.

Untuk implementasi RB di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah terlaksana 85 rencana aksi dari target 88 rencana aksi yang terakumulasi hingga TW II.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan
Tahun 2025 di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar**

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori Capaian Terhadap Target	Notifikasi Warna
	2025		Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	52,13	52,13	Perlu Upaya Keras	

Perbandingan target tahunan dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT Triwulan II sebesar 52,13 dan belum mencapai dari target Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 100,00. Sehingga capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 52,13 dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan / tahun berikutnya agar target triwulan / tahun depan juga dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada Triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target TW II yang ditetapkan, dengan kategori Baik. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini karena Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah memiliki tim Reformasi Birokrasi yang bertugas menjalankan berbagai jenis rencana aksi yang telah direncanakan dan memastikan rencana aksi RB tersebut tetap terlaksana di setiap triwulannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati. Juga telah dibuat SK Inovasi tiap pokja dan tiap anggota pokja telah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Sebagai upaya untuk penyempurnaan kinerja dan mempertahankan capaian di tahun berikutnya, antara lain memonitoring pelaksanaan rencana aksi RB di Lingkungan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dan

melaksanakan kegiatan - kegiatan atau inovasi- inovasi yang terkait dengan Refomasi Birokrasi sesuai timeline yang disepakati.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tidak terlepas dari adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang terlihat dari matriks rencana aksi masing - masing POKJA yang dimonitoring secara rutin, serta telah adanya SK RB dengan masing-masing POKJA sesuai fungsinya.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi pada TW II yakni Review SOP Mikro dan Sosialisasinya belum dapat terlaksana karena hingga saat ini, SOP Makro POM 02, POM 09, dan POM 10 masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dilaksanakan SOP Mikro maupun Sosialisasinya.

e. Tindakan Perbaikan

Beberapa rencana aksi TW II tidak dapat terlaksana yakni Review SOP Mikro dan Sosialisasinya belum dapat terlaksana karena hingga saat ini, SOP Makro POM 02, POM 09, dan POM 10 masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dilaksanakan SOP Mikro maupun Sosialisasinya. Selain itu, pemantauan akan pelaksanaan matriks RB juga harus dipantau setiap bulannya untuk memonitoring dan mengevaluasi rencana aksi yang telah disusun dan dilaksanakan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya disusun berdasarkan data dari TW I tahun 2025, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi dan Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum Rencana Aksi Bulan/ Triwulan Sebelumnya	Kondisi Setelah Rencana Aksi Bulan/ Triwulan Sebelumnya	Arahan Pimpinan
		Rekomendasi	Selesai	Belum				
				Rencana Aksi	Timeline			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Berkoordinasi dengan masing-masing balai penguji terkait rencana pelaksanaan sampling setelah efisiensi	✓	-	-	Telah melakukan sampling bulan februari sesuai renlak	Telah melakukan sampling bulan februari sesuai renlak	Tetap berkoordinasi dengan balai penguji dalam rencana pelaksanaan sampling dan segera mempelajari selfasessmen dalam pelaporan hasil kinerja terbaru
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Koordinasi tiap bulan mengenai rencana pelaksanaan sampling	✓	-	-	Seluruh sampel yang dikirimkan dilakukan pengujian oleh Balai POM di Ambon	Seluruh sampel yang dikirimkan dilakukan pengujian oleh Balai POM di Ambon dan dilaporkan dan dilakukan pemantauan oleh petugas Loka	
		Koordinasi dengan koordinator lab pangan untuk menyelesaikan Pengujian tepat waktu		Terus memantau pelaksanaan pengujian melalui Koordinator dengan Lab. Pangan Balai Penguji (Ambon)	Maret			

3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Kolaborasi dan Advokasi dengan Pemda dan Instansi Terkait	✓	Melakukan koordinasi dan atau advokasi dengan Dinkes selaku penanggung jawab penanganan KLB	Des-25	Hingga bulan Maret belum terdapat kasus KLB di Wilayah kerja Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar	Hingga bulan Maret belum terdapat kasus KLB di Wilayah kerja Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar	Pertahankan kolaborasi dan advokasi dengan Pemda dan Instansi terkait terkhusus Dinkes sebagai penanggung jawab KLB
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring dan koordinasi dengan Lab Pangan Balai Ambon untuk menyelesaikan Pengujian tepat waktu	✓	Terus memantau pelaksanaan pengujian melalui Koordinator dengan Lab. Pangan Balai Penguji (Ambon)	Maret	Seluruh sampel yang dikirimkan dilakukan pengujian oleh Balai POM di Ambon	Seluruh sampel yang dikirimkan dilakukan pengujian oleh Balai POM di Ambon	Tetap berkoordinasi dengan balai penguji dalam rencana pelaksanaan sampling dan segera mempelajari selfasessmen dalam pelaporan hasil kinerja terbaru
5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Melakukan komunikasi dan pengawasan terhadap tindaklanjut dari pelaku usaha	✓	Monitoring surat-surat yang belum ditindak lanjuti	Apr-24	Melakukan komunikasi dan pengawasan pada tindak lanjut perbaikan dari pelaku usaha	Melakukan komunikasi dan pengawasan pada tindak lanjut perbaikan dari pelaku usaha	Berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap pebaikan yang dilakukan pelaku usaha, dan terus memonitor surat yang belum ditindak lanjuti

6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		✓	Mencari jadwal transportasi untuk ke MBD dan berkoordinasi dengan pelaku usaha	TW III	Melakukan perencanaan dan berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan perencanaan dan berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Segera melakukan perencanaan pemeriksaan di MBD dan memperhatikan segala kondisi dari transportasi, personil dan komunikasi dengan pelaku usaha.
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	masih terdapat berapa temuan dan masukan untuk umkm nure lakrue sehingga perlu dilakukan perbaikan	✓	-	-	Berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan pangan olahan	Berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan pangan olahan	Segera melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan.
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan renlak setelah efisiensi serta anggota tim pemeriksaan	✓	-	-	Adanya perubahan target dikarenakan adanya efisiensi anggaran	Adanya perubahan target dikarenakan adanya efisiensi anggaran	Memonitor keputusan perubahan target dan tetap berkoordinasi dengan pusat. Segera melakukan penyesuaian perencanaan pemeriksaan
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	Memberikan sanksi kepada sarana yang melakukan temuan berulang	✓	Berkoordinasi ke dinas terkait (disperindag dan PTSP) untuk sanksi yang lebih berat yaitu penghentian sementara kegiatan	-	Melakukan pemeriksaan sesuai dengan renlak dan memberikan saksi pada sarana yang	Melakukan pemeriksaan sesuai dengan renlak dan memberikan saksi pada sarana yang	

				dan rekomendasi pencabutan izin		terdapat temuan berulang	terdapat temuan berulang	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan iklan sudah sesuai dengan renlak ; memonitoring waktu pelaporan iklan hingga sampai operator pusat	✓	-	-	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai renlak dan menyesuaikan dengan proporsi media sebagai dasar pedoman	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai renlak dan menyesuaikan dengan proporsi media sebagai dasar pedoman	Melakukan pemeriksaan sesuai renlak serta mempelajari mengisian selfasessment pelaporan kinerja
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Melakukan perencanaan untuk personil penguji pada TW II; melakukan perencanaan pemenuhan SRL Pangan Identifikasi Methanil Yellow melalui kegiatan mobling pada TW II; 2. Melaksanakan Verifikasi Rapid Tes Kit Obat untuk 2 sampel Metilprednisolon dan Ibuprofen	✓		TW II	Memenuhi ketersediaan ruangan Lab dan perencanaan untuk mengatur personil penguji yang masih merangkap di fungsi lain.	Memenuhi ketersediaan ruangan Lab dan perencanaan untuk mengatur personil penguji yang masih merangkap di fungsi lain	Memaksimalkan pemenuhan target standar kemampuan laboratorium sehingga dapat mencapai target di TW II

		pada TW II, serta melakukan pengujian Rapid Tes Kit Obat pada TW II						
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Dari hasil analisis penyebab kegagalan diketahui nilai indikator pemahaman dan manfaat KIE pada survey KIE medsos paling rendah dibandingkan yang lain masing-masing 76.79 dan 73.21 maka dapat direkomendasi tindaklanjut yang dapat dilakukan berupa penambahan jumlah responden dan membuat produk KIE untuk	-	Menambah jumlah responden pada survey efektivitas KIE medsos. - Membuat produk kie medsos dengan tema yang berulang dengan desain yang bervariasi agar pemahaman dan manfaat dari KIE tersebut dapat tertanam pada responden dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.	Jun-25	Belum dilaksanakan KIE dan pengisian survey	Belum dilaksanakan KIE dan pengisian survey	

		medsos dengan tema yang berulang dengan desain yang berbeda						
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dari progres diperlukan koordinasi lanjutan dan penjadwalan ulang kegiatan advokasi	✓	Melakukan koordinasi kembali untuk memastikan lokus pelaksanaan kegiatan dan menjadwalkan pelaksanaan advokasi - Bersurat resmi ke direktorat PMPU untuk permohonan persetujuan	Apr-25	Belum terlaksananya pre-advokasi / advokasi/ koordinasi dengan pimpinan daerah	Telah terlaksananya kegiatan koordinasi dengan perwakilan pimpinan daerah Kab. Kepulauan Tanimbar untuk program prioritas pangan nasional (Sekolah, Desa, Pasar)	
14	Jumlah desa pangan aman	Dari progres diperlukan koordinasi lanjutan dan penjadwalan ulang kegiatan advokasi	✓	- Melakukan koordinasi kembali untuk memastikan lokus pelaksanaan kegiatan dan menjadwalkan pelaksanaan	Apr-25	Belum terlaksananya pre-advokasi / advokasi/ koordinasi dengan pimpinan daerah	Telah terlaksananya kegiatan koordinasi dengan perwakilan pimpinan	Mengkomunikasikan ke PIC Program pusat terkait pengisian realisasi di RHPK, apakah dapat diisi berdasarkan

				advokasi - Bersurat resmi ke direktorat PMPU untuk permohonan persetujuan			daerah Kab. Kepulauan Tanimbar untuk program prioritas pangan nasional (Sekolah, Desa, Pasar)	progress dan segera melanjutkan pada tahap kegiatan berikutnya dan tetap berkoordinasi dengan stakeholder.
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Dari progres diperlukan koordinasi lanjutan dan penjadwalan ulang kegiatan advokasi	✓	- Melakukan koordinasi kembali untuk memastikan lokus pelaksanaan kegiatan dan menjadwalkan pelaksanaan advokasi - Bersurat resmi ke direktorat PMPU untuk permohonan persetujuan	Apr-25	Belum terlaksananya pre-advokasi / advokasi/ koordinasi dengan pimpinan daerah	Telah terlaksananya kegiatan koordinasi dengan perwakilan pimpinan daerah Kab. Kepulauan Tanimbar untuk program prioritas pangan nasional (Sekolah, Desa, Pasar)	
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Optimal	- Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan waktu luang Pelaku Usaha UMKM	✓	Menghubungi pelaku usaha untuk menyocokkan waktu dalam melakukan pendampingan	April	Melakukan perencanaan dalam melakukan sosialisasi keamanan pangan pada pelaku usaha UMKM	Melakukan perencanaan dalam melakukan sosialisasi keamanan pangan pada pelaku usaha UMKM	Segara melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tetap berkoordinasi dengan pelaku usaha.

17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Melaksanakan kegiatan intelijen di wilayah pengawasan yang belum pernah dilakukan kegiatan intelijen; 2) Terus melakukan follow up P-16 di Kejaksaan Negeri Kab. Kep. Tanimbar.	Sep-25	1) Kegiatan intelijen; 2) Berkoordinasi dengan kejaksaan	1) s.d. Agustus 2025; 2) April 2025.	1)Terkait perkara 2025 belum dapat ditentukan; 2) Belum ada P-16 untuk perkara carryover 2024	1)Terkait perkara 2025 belum dapat ditentukan; 2) Sudah ada P-16 untuk perkara carryover 2024	Tetap melaksanakan rencana pengawasan intelijen sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun.	Maret 2025	Pelaksanaan sesuai perencanaan	Mar-25	Kegiatan input rawan kasus, patroli siber dan profiling belum dilaksanakan	Kegiatan input rawan kasus, patroli siber dan profiling sudah dilaksanakan	
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Survey IPP belum dilakukan	Survey IPP belum dilakukan	Memperhatikan daduk yang diperlukan, dan melaksanakan survey sesuai arahan pusat
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Memantau perkembangan dalam pengisian Laporan internal	-	Rapat Evaluasi Internal (Rapat Kinerja) atau Rapat Bulanan (Notulen, Absen, Dokumentasi)	Setiap bulan tahun 2025	Tidak ada kendala, segera menindaklanjuti rekomendasi AKIP 2024	Melaksanakan Rapat Bulanan/ Triwulan sebelum tanggal 10 pada Bulan Berikutnya	Segera menindaklanjuti rekomendasi AKIP 2024 dan melakukan pemantauan pelaporan kinerja yang sesuai

								dengan Panduan SAKIP 2024
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang : Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 Adanya penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025	✓	Memonitor anggaran sesuai perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan KKPN terkait penginputan Capaian Output TW1.	Setiap bulan, 2025	Melakukan perubahan proporsi UP dan penyesuaian pada RPD serta segera melakukan penginputan capaian output.	Melakukan perubahan proporsi UP dan penyesuaian pada RPD serta segera melakukan penginputan capaian output.	Memantau setiap perencanaan RPD dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Berkoordinasi dengan KKPN untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran.

22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Telah dilakukan breakdown daftar risiko pada pemilik risiko pada masing-masing bagian seksi di lingkungan kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	-		Jan-25	Daftar resiko hanya diupload /dilaporkan di aplikasi SAPA APIP	Daftar resiko sudah masuk di masing masing tupoksi yang ada di aplikasi SIMAKIN	Tim Manrisk tetap memonitoring kesesuaian pengendalian di setiap fungsi.
23	Persentase Implementasi Rencana Aksi	melanjutkan dan memfollow up pelaksanaan sesuai dengan timeline yg telah ditetapkan	✓	-	-	Belum adanya SK Tim RB	sudah ada SK Tim RB yg ditetapkan	Melaksanakan tugas sesuai kertas kerja yang telah disepakati Bersama.

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 12.282.785.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2025 hingga TW II adalah Rp. 1.180.264.603 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 9,61 %, untuk setiap indikator sebagai berikut :

Tabel 63. Realisasi Anggaran Per Indikator Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran			Volume		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,232,000	33,614,880	32,56	80,00	96,36	120,45
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44,150,000	15,249,419	34,54	75,00	97,16	129,55
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	8,830,000	3,049,882	34,54	0,00	0,00	0,00
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35,320,000	12,199,528	34,54	85,00	91,67	107,84

	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	42,929,000	9,385,533	21,86	78,00	70,97	90,98
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10,404,400	340,000	3,27	87,00	0,00	0,00
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10,404,400	340,000	3,27	85,00	100,00	117,65
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	148,511,600	37,202,132	25,05	95,00	94,43	99,40
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	148,511,600	37,202,132	25,05	85,00	90,45	106,41
	Persentase iklan sediaan farmasi	36,529,000	9,385,533	25,69	93,6	99,15	105,93

	dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan						
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	892,766,000	8,283,400	0.93	7,5	7,87	104,93
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,852,500	20,730,500	22,33	85,87	83,68	97,45
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	93,292,000	20,498,750	21,97	75,00	75,00	100,00
	Jumlah desa pangan aman	144,017,000	9,651,000	6,70	75,00	75,00	100,00
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	93,227,000	2,295,000	2,46	75,00	75,00	100,00
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	26,500,000	340,000	1,28	51,00	55,00	107,84

standar keamanan dan mutu	pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan						
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	155,356,000	34,269,500	22,06	0,00	27,50	0,00
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	48,450,000	850,000	1,75	50,00	50,00	100,00
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	29,883,500	1,052,000	3,52	0,00	0,00	0,00
Terwujudnya tata kelola	Nilai AKIP UPT BPOM	705,671,500	244,252,009	34,61	0,00	0,00	0,00

pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	8,820,031,00 0	459,983,25 9	5,22	0,00	0,00	0,00
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	277,566,500	130,097,08 6	46,87	0,00	0,00	0,00
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	314,350,000	89,993,070	28,63	50,00	52,125	104,25
Total		12,282,785,0 00	1,180,264,6 03	9,61	53,61	53,97	69,91

3.3.2 Realisasi anggaran per Sasaran

Berikut realisasi anggaran Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Tabel 64. Tabel Realisasi Anggaran per sasaran strategis TW II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Anggaran		
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	588,822,000	157,969,030	26.83
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	892,766,000	8,283,400	0.93
Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT	423,388,500	53,175,250	12,55
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	26,500,000	340,000	1.28

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	155,356,000	34,269,500	22.06
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	48,450,000	850,000	1.75
Layanan Publik UPT yang Prima	29,883,500	1,052,000	3.52
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	10,117,619,000	924,325,424	9.13
Total	12,282,785,000	1,180,264,603	9.61

Adapun uraian realisasi anggaran per sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** menunjukkan capaian tertinggi, yakni 22,06% atau sebesar Rp34.269.500 dari pagu Rp155.356.000. Hal ini menunjukkan adanya prioritas pada aspek penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan.
2. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar 26,83% atau Rp157.969.030 dari total anggaran Rp588.822.000. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan rutin sudah dijalankan meski belum maksimal.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal** mencatat realisasi 9,13% atau Rp924.325.424 dari anggaran terbesar yaitu Rp10.117.619.000. Meskipun secara nominal cukup besar, capaian persentasenya masih perlu ditingkatkan.
4. **Layanan Publik UPT yang Prima** menunjukkan realisasi 3,52% atau Rp1.052.00 dari pagu Rp29.883.500. Kegiatan ini masih dalam tahap awal implementasi.
5. **Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja UPT** mencapai 12,55% atau Rp53.175.250 dari pagu Rp423.388.500, mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mulai berjalan namun belum signifikan.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** baru terealisasi sebesar 1,75% atau Rp850.000 dari anggaran Rp48.450.000.
 7. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** mencapai 1,28% atau Rp340.000 dari pagu Rp26.500.000, mengindikasikan bahwa kegiatan pendampingan UMKM kepada masyarakat mulai berjalan namun belum signifikan.
 8. **Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** baru terealisasi sebesar 0,93% atau Rp8.283.400 dari pagu Rp892.766.000, yang menunjukkan perlunya perhatian untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung teknis ini.
- Secara umum, capaian realisasi masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih berada di tahap awal. Perlu dilakukan percepatan kegiatan dan penyesuaian strategi pelaksanaan agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana tahunan.

3.3.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran

Evaluasi dan analisis anggaran berisi perbandingan rencana dan realisasi anggaran per program/kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisa tingkat pencapaiannya

Tabel 65. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 (Rupiah)

	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Belanja Pegawai	1,014,545,000	503,093,343	511,451,657	49,59
Belanja Barang	1,014,545,000	677,171,260	337,373,740	66,75
Belanja Modal	8,626,733,000	0	8,626,733,000	0
TOTAL BELANJA	12,282,785,000	1,180,264,603	9,475,558,397	9,61

3.3.4 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 66. Tingkat Efisiensi IKU dan Anggaran TW II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Output (kinerja)			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,36	120,45	33.614.880	33.614.880	100,00	1,20	0,20	100 %	Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,16	129,55	15.249.410	15.249.410	100,00	1,30	0,30	95 %	Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0,00	0,00	0,00	3.049.882	3.049.882	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,67	107,85	12.199.528	12.199.528	100,00	1,08	0,08	100 %	Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	78,00	70,97	90,99	9.385.533	9.385.533	100,00	0,91	-0,09	75 %	Tidak Efisien

	dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder										
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	0,00	0,00	340.000	340.000	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	340.000	340.000	100,00	1,18	0,18	100 %	Efisien
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	94,43	99,40	37.202.132	37.202.132	100,00	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85,00	90,45	106,41	37.202.132	37.202.132	100,00	1,06	0,06	100 %	Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,60	99,15	105,93	9.385.533	9.385.533	100,00	1,06	0,06	100 %	Efisien

11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,50	7,87	104,93	8.283.400	8.283.400	100,00	1,05	0,05	100 %	Efisien
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,87	83,68	97,45	20.730.500	20.730.500	100,00	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75,00	75,00	100,00	20.498.750	20.498.750	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
14	Jumlah desa pangan aman	75,00	75,00	100,00	9.651.000	9.651.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75,00	75,00	100,00	2.295.000	2.295.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	51,00	55,00	0,00	340.000	340.000	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

	CPPOB pangan olahan										
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	27,00	0,00	34.269.500	34.269.500	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	850.000	850.000	100,00	1,00	1,60	80 %	Tidak Efisien
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	0,00	0,00	1.052.000	1.052.000	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
20	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0,00	0,00	244.252.009	244.252.009	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00	0,00	0,00	459.983.259	459.983.259	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	0,00	0,00	130.097.085	130.097.085	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50,00	52,13	104,25	89.993.070	89.993.070	100,00	1,04	0,04	100 %	Efisien

TOTAL	53,6	53,9	69,9	1.180.264.	1.180.26	100,00	0,69	-0,31	75 %	Tidak Efisien
	1	7	1	603	4.603					

Tabel 67. Tingkat Efisiensi Kegiatan dan Anggaran TW II Tahun 2025

No	Komponen Rincian Output	Output (kinerja)			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
		T	R	%	T	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (3165.AEA.001)	14	6	42,86	48.450.000,00	850.000,00	1,75	24,43	23,43	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (3165.BAH.001)	1	0	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
3	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (3165.BDC.001)	104	53	50,96	71.969.000,00	19.678.500,00	27,34	1,86	0,86	88 %	Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (3165.BKB.001)	1	0	0,00	257.000.000,00	12.868.465,00	5,01	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (3165.BMB.001)	25	14	56,00	41.767.000,00	2.104.000,00	5,04	11,12	10,12	75 %	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	6	0	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien

	di Seluruh Indonesia (3165.CAB.002)										
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi (3165.CAN.001)	7	7	100,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (3165.CBV)	1	0	0,00	8.496.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (3165.PDD.001)	1	0	0,00	124.107.000,00	8.283.400,00	6,67	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar (3165.QCD.U49)	1	0	0,00	155.356.000,00	34.269.500,00	22,06	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman (3165.QDB.001)	2	0	0,00	93.292.000,00	20.498.750,00	21,97	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman (3165.QDB.002)	1	0	0,00	144.017.000,00	9.651.000,00	6,70	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (3165.QDB.003)	1	0	0,00	93.227.000,00	2.295.000,00	2,46	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar (3165.QDG.001)	1	0	0,00	12.500.000,00	340.000,00	2,72	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (3165.QIA.001)	149	86	57,72	88.300.000,00	43.907.640,00	49,73	1,16	0,16	100 %	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (3165.QIA.002)	108	33	30,56	103.232.000,00	20.206.060,00	19,57	1,56	0,56	92 %	Efisien
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (3165.QIC.001)	4	2	50,00	10.011.000,00	850.000,00	8,49	5,89	4,89	75 %	Tidak Efisien
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (3165.QIC.004)	271	87	32,10	355.279.000,00	93.005.330,00	26,18	1,23	0,23	95 %	Efisien
19	Layanan BMN (6384.EBA.956)	1	0	0,00	8.000.000,00	998.000,00	12,48	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

20	Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	1	0	0,00	2.035.545.000,00	910.458.958,00	44,73	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
TOTAL		35	14,4	21,01%	12.282.785.000,00	1.180.264.603,00	9,61%	2,19	1,19	86 %	Tidak Efisien

Penyebab in-efisiensi penggunaan sumber daya:

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan 20 kegiatan utama dengan 23 indikator untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil seluruh indikator tidak efisien terhadap pagu awal namun efisien terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara <0,00 sampai 23,43.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (anggaran dan manusia) terbatas, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Meskipun terdapat indikator dengan hasil perhitungan yang tidak efisien, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran berikutnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya yaitu

1. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan rencana penarikan dana sejalan dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Melaksanakan monev rapat kinerja dan anggaran setiap bulannya antara pimpinan dengan penanggung jawab dan pengelola anggaran pada masing-masing program/kegiatan.

Monitoring secara aktif oleh petugas Monev terhadap nilai IKPA dan EKA khususnya terkait unsur-unsur meliputi: Monitoring Revisi DIPA, Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Capaian Output, Pengelolaan UP TUP, data kontrak dan Penyelesaian tagihan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Evaluasi Kinerja Interim Triwulan II didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 - 2029. Perjanjian Kerja Loka POM Tanimbar untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 23 indikator kinerja utama. Dari 8 sasaran strategis, semuanya telah dilakukan pengukuran dan penilaian di Triwulan II.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 8 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025, diperoleh data capaian sebagai berikut: sebanyak 3 sasaran strategis mencapai kategori “Istimewa”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Baik”, 2 sasaran strategis tergolong dalam kategori “Butuh Perbaikan”, dan 1 sasaran strategis menunjukkan capaian “Kurang”.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.180.264.603 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 9,61%, dari DIPA TA 2025 sebesar Rp. 12.282.785.000

Pada triwulan berikutnya Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sejumlah upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu:

- 1. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Instansi,** Kegiatan sampling dan pengujian produk impor telah dialihkan ke bulan Juli dengan koordinasi rutin antar bulan. Koordinasi teknis juga telah dilakukan dengan Koordinator Laboratorium Pangan Balai Ambon untuk memastikan parameter uji dan waktu pelaporan hasil sesuai rencana. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat guna mendukung kegiatan pengawasan dan advokasi pangan.

- 2. Efektivitas Pengawasan dan Tindak Lanjut**, Inspeksi pasca-sertifikasi dilaksanakan sesuai jadwal dan temuan UMKM seperti Ardhella terus di-follow-up sebagai langkah perbaikan. Pengawasan iklan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlak), termasuk pencarian iklan di toko besar untuk memenuhi proporsi media luar ruang dan cetak. Monitoring pelaporan SIPT dilakukan mulai dari operator hingga supervisor, serta dilakukan pengawalan terhadap tindak lanjut pelaku usaha dan penanggung jawab sarana kefarmasian.
- 3. Pendampingan UMKM dan Edukasi Publik**, Sosialisasi keamanan pangan dilakukan secara daring serta dilakukan pendampingan terhadap UMKM pangan olahan yang telah berkomitmen mengikuti bimtek CPPoB dan mengurus izin edar. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) telah dilaksanakan pada bulan Juni sesuai jadwal, disertai pelatihan kader melalui koordinasi terjadwal.
- 4. Tata Kelola Internal dan Perencanaan**, Laporan kinerja (Lapkin), laporan internal, dan evaluasi telah diunggah melalui aplikasi SAPA APIP. Evaluasi manajemen risiko semester I dilakukan sebelum tanggal 20 Juli. Pemanfaatan aplikasi pengadaan INAPROC telah dioptimalisasi dalam rangka pengawasan anggaran dan realisasi. Kegiatan telah dijalankan sesuai rencana kerja dengan pemantauan berkala terhadap aksi yang belum terlaksana.
- 5. Intelijen dan Peninjauan Kebijakan**, Kegiatan intelijen mulai dijalankan di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau. Pelaksanaan rapid test dilakukan terhadap 3 sampel pada Triwulan III sesuai Renlak. Selain itu, telah dilakukan review dan sosialisasi SOP mikro setelah penetapan SOP makro dari pusat, serta pemantauan hasil survei terkait keamanan pangan masyarakat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah perbaikan di atas secara konsisten, diharapkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang diawasi.

LAMPIRAN

(RANCANGAN RENSTRA, RKT, PK, RAPK)

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

NOMOR HK.02.02.27C.09.24.62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR**

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR**

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja LokaPengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



ANTON DWI NURCAHYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.27C.09.24.62 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN
2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	sektor	ke stakeholder tepat waktu	
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



ANTON DWI NURCAHYO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Dwi Nurcahyo

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Taruna Ikrar

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Saumlaki, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar

Anton Dwi Nurcahyo

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Taruna Ikrar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.6 Persentase
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.87 Persentase
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76.55 Persentase
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.66 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12,282,785,000 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,239,240,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,043,545,000

Saumlaki, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar


Anton Dwi Nurcahyo

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Taruna Ikrar



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	103,232,000
NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
1.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			C - Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			11,760,000		11,760,000			
2.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan			12,212,000		12,212,000			
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam,			A - Koordinasi/Konsultasi Pengujian Sampel LOKA			9,500,000		9,500,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI				
				kosmetika, suplemen kesehatan											
		4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - Pengadaan Sampel			46,280,000	46,280,000				
		5.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			D - Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024			23,480,000	23,480,000				
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	44,150,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - Koordinasi dan Pelaksanaaan Sampling dan Pengujian Pangan Petugas Loka			8,870,000	4,435,000				
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan			12,060,000	6,030,000				
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel Loka			55,630,000	27,815,000				

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																								
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																									
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="10">A - Pengadaan Sampel Loka</td><td>55,630,000</td><td>22,252,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="10">B - Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024</td><td>11,740,000</td><td>4,696,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengujian laboratorium sampel makanan</td><td colspan="10">B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan</td><td>12,060,000</td><td>4,824,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengujian laboratorium sampel makanan</td><td colspan="10">A - Koordinasi dan Pelaksanaaan Sampling dan Pengujian Pangan Petugas Loka</td><td>8,870,000</td><td>3,548,000</td></tr><tr><td colspan="2">06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td>42,929,000</td></tr><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td colspan="10">I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK</td><td>12,560,000</td><td>1,256,000</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Loka										55,630,000	22,252,000	2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024										11,740,000	4,696,000	3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan										12,060,000	4,824,000	4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Koordinasi dan Pelaksanaaan Sampling dan Pengujian Pangan Petugas Loka										8,870,000	3,548,000	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	42,929,000	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK										12,560,000	1,256,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																							
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Loka										55,630,000	22,252,000																																																																																																																							
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024										11,740,000	4,696,000																																																																																																																							
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan										12,060,000	4,824,000																																																																																																																							
		4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Koordinasi dan Pelaksanaaan Sampling dan Pengujian Pangan Petugas Loka										8,870,000	3,548,000																																																																																																																							
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	42,929,000																																																																																																																							
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																									
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK										12,560,000	1,256,000																																																																																																																									

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika							13,740,000	1,374,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Pelatihan Food Inspectur							12,560,000	1,256,000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pengawasan Sarana Distribusi di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar							110,759,000	11,075,900
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)							12,860,000	1,286,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan						90,640,000	9,064,000		
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar						12,760,000	1,276,000		
		8.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor			A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua						32,000,000	6,400,000		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - Pelatihan Inspektur CDOB						12,560,000	1,256,000		
		10.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar						10,011,000	1,001,100		
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka			E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam						12,560,000	1,256,000		

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																				
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																					
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="2">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</td><td>051 - Pengadaan kendaraan bermotor</td><td colspan="2">A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua</td><td>32,000,000</td><td>6,400,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="2">A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar</td><td>10,011,000</td><td>4,004,400</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor	A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua		32,000,000	6,400,000	2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar		10,011,000	4,004,400
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI																											
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor	A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua		32,000,000	6,400,000																											
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar		10,011,000	4,004,400																											
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10,404,400																				
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="2">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="2">A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar</td><td>10,011,000</td><td>4,004,400</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</td><td>051 - Pengadaan kendaraan bermotor</td><td colspan="2">A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua</td><td>32,000,000</td><td>6,400,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar		10,011,000	4,004,400	2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor	A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua		32,000,000	6,400,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI																											
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar		10,011,000	4,004,400																											
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor	A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua		32,000,000	6,400,000																											

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																															
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	148,511,600																														
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK</td><td>12,560,000</td><td>5,024,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)</td><td>12,860,000</td><td>5,144,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan</td><td>90,640,000</td><td>36,256,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran</td><td>12,560,000</td><td>5,024,000</td></tr></table>																NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK	12,560,000	5,024,000	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12,860,000	5,144,000	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan	90,640,000	36,256,000	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran	12,560,000	5,024,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																								
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK	12,560,000	5,024,000																																								
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12,860,000	5,144,000																																								
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan	90,640,000	36,256,000																																								
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran	12,560,000	5,024,000																																								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			Makanan yang Diperiksa oleh UPT					Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah								
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika						13,740,000	5,496,000	
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK NF POM TA 2025						10,860,000	4,344,000	
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Join Inspection Pengawasan Obat dan Makanan						41,160,000	16,464,000	
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - Pelatihan Inspektur CDOB						12,560,000	5,024,000	
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Pelatihan Food Inspectur						12,560,000	5,024,000	

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika							13,740,000	5,496,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pengawasan Sarana Distribusi di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar							110,759,000	44,303,600
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah							12,560,000	5,024,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan							90,640,000	36,256,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)							12,860,000	5,144,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar							12,760,000	5,104,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP							12,260,000	4,904,000
		12.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor				A - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua							32,000,000	6,400,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Pelatihan Food Inspectur							12,560,000	5,024,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																															
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	36,529,000																														
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP</td><td>12,260,000</td><td>1,226,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar</td><td>10,011,000</td><td>1,001,100</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK</td><td>12,560,000</td><td>1,256,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah</td><td>12,560,000</td><td>1,256,000</td></tr></table>																NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP	12,260,000	1,226,000	2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar	10,011,000	1,001,100	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK	12,560,000	1,256,000	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	12,560,000	1,256,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																								
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP	12,260,000	1,226,000																																								
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar	10,011,000	1,001,100																																								
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan OT dan SK	12,560,000	1,256,000																																								
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	12,560,000	1,256,000																																								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Join Inspection Pengawasan Obat dan Makanan							41,160,000	4,116,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)							12,860,000	1,286,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Pelatihan Food Inspectur							12,560,000	1,256,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK NF POM TA 2025							10,860,000	1,086,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Koordinasi/Konsultansi Pengawasan Obat dan Makanan						90,640,000	9,064,000		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pengawasan Sarana Distribusi di Loka Kab. Kepulauan Tanimbar						110,759,000	11,075,900		
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar						12,760,000	1,276,000		
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - Pelatihan Inspektur CDOB						12,560,000	1,256,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika							13,740,000	1,374,000
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	4.69	4.69	4.69	4.91	4.91	4.91	5.23	5.23	5.23	11	763,385,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - Koordinasi Pengujian Laboratorium					20,627,000		20,627,000	
		2.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				B - Perancangan Gedung Laboratorium dan Penunjang Lainnya					1,278,557,000		639,278,500	
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - Operasional dan Pengelolaan Laboratorium					72,000,000		72,000,000	
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan				A - Peningkatan Kompetensi Penguji					31,480,000		31,480,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			kinerja laboratorium					Laboratorium					
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		0	0	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	92,852,500
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - Pelaksanaan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat			10,600,000		5,300,000		
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Forum Konsultasi Publik			17,220,000		8,610,000		
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Pelaksanaan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan ke Masyarakat			13,947,000		6,973,500		
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - KIE Obat dan Makanan Aman			71,969,000		71,969,000		
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	0	25	75	75	75	100	100	100	100	100	2	93,292,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																															
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td>B - Pemeriksaan Penilaian Kantin Sekolah Dalam Rangka Sertifikasi Kantin</td><td>6,780,000</td><td>6,780,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td>A - Bimtek Kader PJAS</td><td>6,130,000</td><td>6,130,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>051 - Koordinasi lintas sektor</td><td>B - Kursus Orientasi SAKA POM di Maluku Barat Daya</td><td>33,272,000</td><td>33,272,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>051 - Koordinasi lintas sektor</td><td>A - Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman</td><td>47,110,000</td><td>47,110,000</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - Pemeriksaan Penilaian Kantin Sekolah Dalam Rangka Sertifikasi Kantin	6,780,000	6,780,000	2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - Bimtek Kader PJAS	6,130,000	6,130,000	3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Kursus Orientasi SAKA POM di Maluku Barat Daya	33,272,000	33,272,000	4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	47,110,000	47,110,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																						
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - Pemeriksaan Penilaian Kantin Sekolah Dalam Rangka Sertifikasi Kantin	6,780,000	6,780,000																																						
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - Bimtek Kader PJAS	6,130,000	6,130,000																																						
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Kursus Orientasi SAKA POM di Maluku Barat Daya	33,272,000	33,272,000																																						
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	47,110,000	47,110,000																																						
		03 - Jumlah desa pangan aman		0	0	25	50	75	75	100	100	100	100	100	1	144,017,000																													
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td>B - Meet The Admins</td><td>12,760,000</td><td>12,760,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td>A - Advokasi Kelembagaan Desa</td><td>11,980,000</td><td>11,980,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td>C - Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)</td><td>12,760,000</td><td>12,760,000</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - Meet The Admins	12,760,000	12,760,000	2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - Advokasi Kelembagaan Desa	11,980,000	11,980,000	3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)	12,760,000	12,760,000						
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																						
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - Meet The Admins	12,760,000	12,760,000																																						
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - Advokasi Kelembagaan Desa	11,980,000	11,980,000																																						
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)	12,760,000	12,760,000																																						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				D - Workshop Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Pengaduan Masyarakat				12,760,000		12,760,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa				25,390,000		25,390,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa				46,407,000		46,407,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				A - Fasilitasi Keamanan Pangan Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa				7,100,000		7,100,000		
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				B - Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa				8,460,000		8,460,000		
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				A - Pengawalan Desa Pangan Aman				3,360,000		3,360,000		
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				B - Lomba Desa Pangan Aman				3,040,000		3,040,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	0	25	25	25	75	100	100	100	100	100	1	93,227,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - Bimbingan Teknis Petugas Pasar		25,985,000	25,985,000				
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				C - Penyuluhan Komunitas pasar dan Kampanye Pasar		7,450,000	7,450,000				
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PASAR AMAN DARI BB		400,000	400,000				
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - Pengambilan Sampel Pasar		3,040,000	3,040,000				
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				B - SURVEY DALAM RANGKA IDENTIFIKASI PASAR TAHUN BERIKUTNYA		12,552,000	12,552,000				
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				C - Workshop Keamanan Pangan Nasional Dalam Rangka Pembahasan Intervensi Keamanan Pangan di Komunitas Masyarakat dan Pelaku Usaha		32,500,000	32,500,000				
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - Pengawasan Keamanan Pangan Pasar Intervensi Sebelumnya		2,600,000	2,600,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung							A - Pengadaan peralatan pendukung			8,700,000		8,700,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		0	0	0	0	50	51	61	71	91	91	91	91	26,500,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi					4,700,000		4,700,000	
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - Pendampingan Langsung Kepada UMKM oleh Loka POM					10,501,000		10,501,000	
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - Sosialisasi Pendampingan UMKM					1,999,000		1,999,000	
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik				A - Penerbitan Sertifikasi					1,200,000		1,200,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam				8,100,000	8,100,000	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	32	65	155,356,000	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR			055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				4,000,000	4,000,000	
		2.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR			055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				33,274,000	33,274,000	
		3.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR			052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				486,000	486,000	
		4.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR			054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				22,500,000	22,500,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				5,275,000	5,275,000
		6.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara				8,610,000	8,610,000
		7.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				44,353,000	44,353,000
		8.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				648,000	648,000
		9.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				31,210,000	31,210,000
		10.	DR.3165.QCD.U49 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR				055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				5,000,000	5,000,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan		77	78	79	80	81	82	84	85	86	87	88	90	48,450,000

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																															
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>A - Pelaksanaan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat</td><td>10,600,000</td><td>5,300,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>C - Forum Konsultasi Publik</td><td>17,220,000</td><td>8,610,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</td><td>053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</td><td>A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</td><td>18,000,000</td><td>9,000,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>B - Pelaksanaan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan ke Masyarakat</td><td>13,947,000</td><td>6,973,500</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Pelaksanaan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat	10,600,000	5,300,000	2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - Forum Konsultasi Publik	17,220,000	8,610,000	3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	18,000,000	9,000,000	4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Pelaksanaan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan ke Masyarakat	13,947,000	6,973,500
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																						
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Pelaksanaan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat	10,600,000	5,300,000																																						
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - Forum Konsultasi Publik	17,220,000	8,610,000																																						
		3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	18,000,000	9,000,000																																						
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Pelaksanaan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan ke Masyarakat	13,947,000	6,973,500																																								
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.55	592,533,250																														
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td>M - Pemeriksaan Kesehatan Rutin</td><td>19,500,000</td><td>19,500,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td>F - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran</td><td>12,560,000</td><td>6,280,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>052 - Pelaksanaan koordinasi</td><td>I - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM</td><td>12,060,000</td><td>12,060,000</td></tr></table>																NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - Pemeriksaan Kesehatan Rutin	19,500,000	19,500,000	2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	12,560,000	6,280,000	3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM	12,060,000	12,060,000						
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																								
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - Pemeriksaan Kesehatan Rutin	19,500,000	19,500,000																																								
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	12,560,000	6,280,000																																								
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM	12,060,000	12,060,000																																								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN		KONTRIBUSI
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - Koordinasi Perjalanan Pimpinan							21,764,000		21,764,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			I - PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SAI							11,600,000		5,800,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			J - Workshop Pembinaan Satu Data Badan POM							12,160,000		12,160,000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			K - Layanan Umum Perkantoran							220,200,000		110,100,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Rapat Evaluasi Nasional BPOM							10,590,000		10,590,000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			P - Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai							11,030,000		11,030,000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Q - SOSIALISASI PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)							2,195,000		2,195,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan							1,014,545,000		253,636,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Konsultasi/Koordinasi/Rapat Kegiatan Lintas Sektor							1,360,000	340,000		
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - Rapat Kerja Nasional Pengawasan Obat dan Makanan (Rakernas POM)							22,480,000	22,480,000		
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		O - LANGGANAN APLIKASI DESAIN GRAFIS (CANVA PRO)							770,000	770,000		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024							12,360,000	12,360,000		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		N - Langganan Video Conference/Komunikasi Kegiatan Operasional Perkantoran							3,263,000	3,263,000		
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)							11,030,000	5,515,000		
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Pelatihan Lead Auditor							12,060,000	6,030,000		
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - Bimbingan Teknis Leadership							11,530,000	11,530,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Rapat Koordinasi Nasional SDM				14,270,000		7,135,000			
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di lingkungan BPOM Tahun 2025-2029				12,560,000		6,280,000			
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi				12,560,000		12,560,000			
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - Peningkatan Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Pegawai				24,620,000		24,620,000			
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PERAWATAN SARANA KANTOR				27,020,000		6,755,000			
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - Perjalanan Advokasi di Kab. Kepulauan Tanimbar dan MBD				7,780,000		7,780,000			
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9,005,336,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Konsultasi/Koordinasi/Rapat Kegiatan Lintas Sektor				1,360,000		680,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				A - Gedung Kantor dan Pelayanan Publik						7,218,176,000		7,218,176,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				F - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025						11,910,000		5,955,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				H - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM						12,360,000		6,180,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN						12,780,000		12,780,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - LANGGANAN DAYA DAN JASA						28,860,000		28,860,000
		7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi						80,000,000		80,000,000
		8.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				B - Perancangan Gedung Laboratorium dan Penunjang Lainnya						1,278,557,000		639,278,500
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN						49,200,000		24,600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan				1,014,545,000		507,272,500		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				D - Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM UnAudited TA 2024				12,360,000		12,360,000		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Bimtek Pengelolaan BMN				12,360,000		6,180,000		
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				G - Pemutakhiran data tahunan 2024				12,360,000		6,180,000		
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan				12,460,000		12,460,000		
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN				583,368,000		291,684,000		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PERAWATAN SARANA KANTOR				27,020,000		13,510,000		
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran				12,560,000		6,280,000		
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SAI				11,600,000		5,800,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai						9,000,000		9,000,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				K - Layanan Umum Perkantoran						220,200,000		110,100,000
		21.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan, monitoring dan penyusunan laporan BMN						8,000,000		8,000,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.66	276,221,250
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PERAWATAN SARANA KANTOR						27,020,000		6,755,000
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran						18,000,000		9,000,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1,014,545,000		253,636,250
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - AUDIT QMS ISO 9001:2015 dan Audit Internal						13,660,000		6,830,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	372,909,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Pelatihan Lead Auditor				12,060,000		6,030,000			
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		H - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM				12,360,000		6,180,000			
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		F - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025				11,910,000		5,955,000			
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		G - Pemutakhiran data tahunan 2024				12,360,000		6,180,000			
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)				11,030,000		5,515,000			
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		E - Bimtek Pengelolaan BMN				12,360,000		6,180,000			
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN				583,368,000		291,684,000			
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di lingkungan BPOM Tahun 2025-2029				12,560,000		6,280,000					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - AUDIT QMS ISO 9001:2015 dan Audit Internal							13,660,000	6,830,000		
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Konsultasi/Koordinasi/Rapat Kegiatan Lintas Sektor							1,360,000	340,000		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Rapat Koordinasi Nasional SDM							14,270,000	7,135,000		
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN							49,200,000	24,600,000		
												Total	12,282,785,000			

Saumlaki, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar


Anton Dwi Nurcahyo

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peranan penting dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia memenuhi khasiat, manfaat, dan mutu yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM memiliki tanggung jawab strategis yang mendukung sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi ketat terkait keamanan, mutu, dan efikasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPOM diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Produk-produk yang diawasi meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Semua produk ini harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di dua kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi obat dan makanan.
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan.
7. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
8. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber.

9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
10. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kontribusi BPOM dalam bidang kesehatan publik sangat signifikan. Pengawasan yang ketat terhadap produk berbahaya membantu mencegah peredaran produk yang tidak aman dan memastikan masyarakat dapat mengakses produk yang berkualitas. Dampaknya langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta pengurangan risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak memenuhi standar sangat terasa.

BPOM beroperasi dalam lingkungan yang terus berubah dan berkembang, dengan tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya pertumbuhan industri obat dan makanan. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus memperbarui dan meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode yang sama. Renstra Loka POM ini mengacu pada Renstra BPOM dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Loka POM di daerah ini menghadapi tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan, mengingat wilayahnya yang terdiri dari dua kabupaten yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Pengembangan Renstra Loka POM untuk periode 2025-2029 merupakan respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan di masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memastikan bahwa Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, dengan mempertimbangkan inovasi dan dinamika sektor ini.

Dengan adanya Renstra periode 2025-2029, BPOM dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertekad untuk melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan publik dengan lebih baik. Melalui implementasi strategi yang terarah, kedua lembaga ini akan memastikan masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, tetap memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 – 2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT															
IKSS 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,10	81	92,03	83,60	81,65	97,67	86,60	91,67	105,85	90,0	94,34	104,82	94,40	97,22	102,99
IKSS 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	96,67	123,94	95,00	94,92	99,92	96,00	92,36	96,21	96,50	95,63	99,10	96,50	97,55	101,08
IKSS 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,10	66,67	74,83	83,6	78,05	93,36	84,50	90,48	107,08	85,00	100,00	117,65	95,20	95,45	100,27
IKSS 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	100	128,21	95,00	74,19	78,09	96,00	97,14	101,19	97,00	88,89	91,64	98,00	100,00	102,04
SS2: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 5 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,25	94,75	104,99
SS3: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT															
IKSS 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	97,37	111,92	89,00	96,97	108,95	90,00	99,50	110,56	91,00	98,30	108,02	98,40	98,74	100,35
IKSS 7 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	59,6	108,36	70,00	48,70	69,57	71,00	66,95	94,30	73,00	73,33	100,45	73,40	82,93	112,98
IKSS 8 - Persentase	85	100	117,65	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100	120	120	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu															
IKSS 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	80	173,91	73,00	81,82	112,08 %	77,00	72,73	94,45	81,00	70,00	86,42	85,00	90,91	106,95
IKSS 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,86	101,56	60,00	82,08	136,80 %	63,00	72,55	115,16	66,00	72,00	109,09	72,30	73,15	101,17
IKSS 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	80,00	100,00	125,00	82,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
IKSS 12 - Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	105,26	105,26

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota															
SS4: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT															
IKSS 13 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	85,18	121,69	91,00	91,65	100,71	91,40	95,21	104,17	92,30	95,19	103,13	96,00	95,41	99,39
SS5: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT															
IKSS 14 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard	50	51,08	102,16	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	60,00	120,00	50,00	50,67	101,33
IKSS 15 - Persentase sampel makanan	50	49,64	99,28	50,00	50,00	100	50,00	50,53	101,06	50,00	60,00	120,00	50,00	50,00	100,00

[illegible]

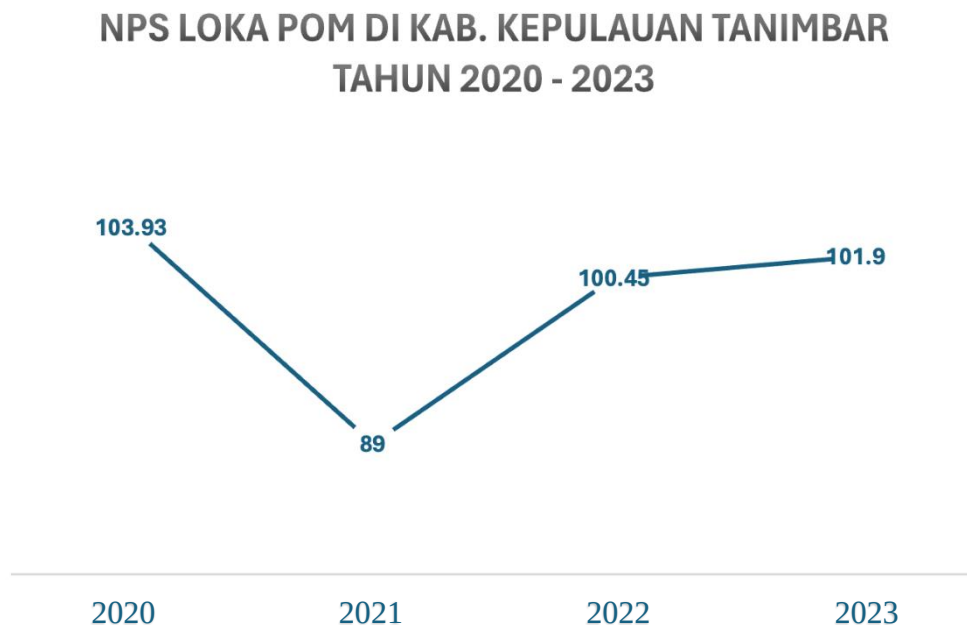
[illegible]

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 24 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26	95	100,00	105,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSS 25 – Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	90	91,11	101,23	90,60	91,15	100,60	91,80	87,90	95,75	90,00		
IKSS 26 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,17	98,87	124,88
IKSS 27 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00		
IKSS 28 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,10	96,99	107,65

(Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, 2021, 2022, 2023, Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, Tahun 2024).

Selama empat tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat sejak tahun 2021. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar berhasil menunjukkan peningkatan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Nilai kinerja pada tahun 2023 mendekati capaian tertinggi yang diraih pada tahun 2020, yaitu 103,93. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah berhasil melakukan

upaya perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja setelah penurunan di tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut



Gambar 1.1 Nilai Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 - 2023

Pengukuran kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang fluktuatif dengan total sebanyak 1.916 sarana dan jumlah produk obat dan makanan yang disampling untuk dilakukan pengujian adalah sebanyak 1.589 produk.
2. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan penjualan obat dan makanan secara online/daring pada marketplace dan sosial media. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini *idEA* (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2020 s.d. September 2024, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menemukan 4034 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah direkomendasikan untuk dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan *idEA*.
3. Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi

baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2021-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 8 UMKM.

4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE fluktuatif dengan total 47 KIE dengan peserta sebanyak 2.307 orang. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki 10 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). SS dan IKSS ini berubah sepanjang 2020-2024 mengikuti perjanjian kinerja dengan pusat. Beberapa SS yang ditambahkan sepanjang periode renstra sebelumnya misalnya SS9: Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; baru ditambahkan pada tahun 2022, dan SS2: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan; baru ditambahkan di tahun 2024. Selain SS, IKSS juga mengalami perubahan, sementara beberapa IKSS ada yang ditambahkan dan ada pula yang dihapuskan. Sehingga pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki 10 SS dan 25 IKSS. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT

Produk yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tergolong berisiko tinggi, sehingga pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis di sepanjang rantai pengawasan. Sistem ini harus mampu mendeteksi dini penurunan mutu, keberadaan produk substandar, atau potensi masalah lainnya agar langkah pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat. Sasaran strategis ini diukur melalui empat indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat,
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat,
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan,
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan beberapa upaya yaitu:

- a. Melakukan pengambilan sampel produk secara acak (*random*) maupun terarah (*targeted*) untuk diuji di balai pengujian regional,
- b. Meningkatkan koordinasi dengan balai pengujian untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengujian, serta
- c. Melakukan randomisasi lokus pengambilan sampel agar mencerminkan kondisi nyata produk yang beredar.

2. Sasaran Strategis (SS2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengawasan obat dan makanan. Sasaran strategis ini dapat diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan responsivitas dan efisiensi yang lebih baik,
- b. Memperkuat komunikasi dan informasi yang transparan dan mudah diakses,
- c. Mengembangkan sistem pelayanan digital untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan,
- d. Melibatkan masyarakat dan pelaku usaha secara aktif melalui dialog dan konsultasi berkala, serta
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kepuasan layanan dengan menindaklanjuti hasil survei IKM dan masukan masyarakat.

3. Sasaran Strategis (SS3)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Pengawasan obat dan makanan di Loka POM dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahap sebelum produk beredar (pre-market) hingga setelah produk beredar (post-market) dengan beberapa kegiatan diantaranya, pemeriksaan dilakukan pada tempat produksi dan distribusi untuk memastikan produk yang beredar aman, bermanfaat, dan memenuhi standar mutu. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam mendukung tugas pengawasan di wilayah kerja Loka POM.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, terdapat enam indikator yaitu:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan,
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan,
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan
- 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Adapun indikator ke-7 merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja SS 3 adalah:

- a) memperkuat kapasitas petugas melalui pelatihan dan pembimbingan yang rutin

- b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
- c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat;
- e) melakukan pendampingan kepada UMKM secara menyeluruh;
- f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan;
- g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
- h) menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- i) Mempertimbangkan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal.

4. Sasaran Strategis (SS4)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya adalah pengawasan berbasis masyarakat, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang aktif dan strategis. Pengetahuan masyarakat yang lebih baik diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Capaian sasaran strategis ini diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS4 adalah:

- a) Menyelenggarakan berbagai program KIE melalui forum tatap muka, kampanye publik, dan pemanfaatan media digital.
- b) Melibatkan komunitas lokal dan tokoh masyarakat menjadi prioritas agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih efektif dan merata, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

5. Sasaran Strategis (SS5)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard,
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu:

- a) Melakukan evaluasi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar,
- b) Mengoptimalkan waktu pengambilan sample agar proses pengiriman sample ke balai regional sesuai dengan *timeline* yang diberikan,
- c) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman

6. Sasaran Strategis (SS6)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu: a) peningkatan kompetensi teknis petugas, b) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, c) penguatan koordinasi lintas sektor CJS, serta, d) penggalangan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

7 Sasaran Strategis (SS7)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur SS 7 adalah:

- 1) Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimba,
- 5) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Indikator ke-2 dan ke-3 tidak lagi digunakan sejak tahun 2024, sedangkan indikator ke-5 baru ditambahkan pada tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu:

- a) Memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
- b) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat
- d) Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah
- e) Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional;

8. Sasaran Strategis (SS8)

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu:

1. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi minimal 20 JP
2. Menegakan disiplin dan kode etik, serta kode perilaku agar tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
3. Mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal

9. Sasaran Strategis (SS9) Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai.. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu:

- a) Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan memaksimalkan penggunaan *email corporate*
- b) Meningkatkan kepatuhan verifikasi data
- c) monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi

10. Sasaran Strategis (SS10) Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan menuntut akuntabilitas tinggi dalam penggunaannya. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mendukung kredibilitas

instansi dalam menjalankan tugasnya . Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan lima indikator yaitu:

- 1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT
- 2) Nilai Kinerja Anggaran UPT
- 3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa,
- 4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- 5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Indikator 1 sudah tidak digunakan sejak tahun 2022, sementara indikator 3,4, dan 5 merupakan indikator baru yang ditambahkan di tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu:

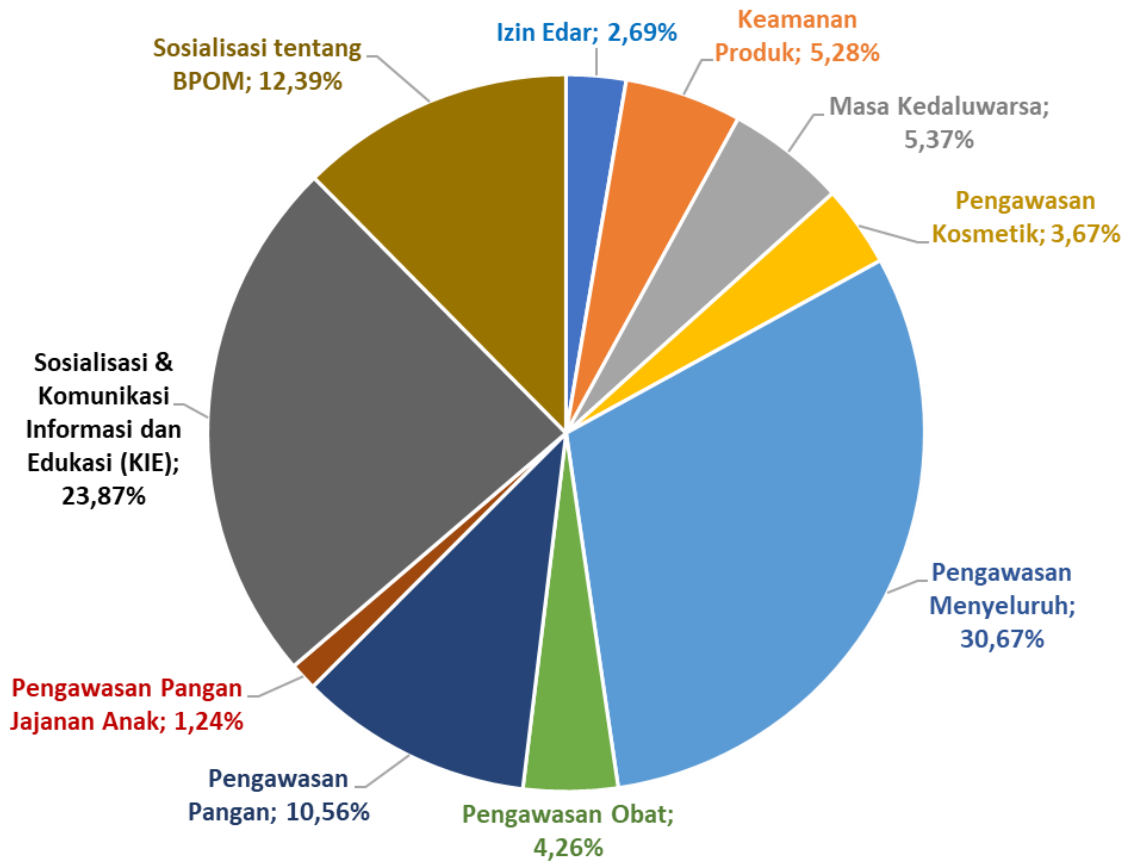
- a) Optimalisasi pengelolaan anggaran,
- b) Penguatan tata Kelola pengadaan barang dan jasa,
- c) Meningkatkan sistem manajemen Barang Milik Negara,
- d) Memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan, sesuai dengan arahan pemerintah.

2. Aspirasi Stakeholder

BPOM menyadari pentingnya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah tantangan masa depan. Dinamika global, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi menuntut pengawasan yang adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, aspirasi dan masukan masyarakat menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Aspirasi masyarakat memainkan peran strategis dalam membantu BPOM memahami dampak perubahan lingkungan strategis, seperti teknologi digital dan pergeseran demografi, terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Dengan berlandaskan masukan tersebut, BPOM dapat mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang relevan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM 2024, BPOM telah menganalisis masukan dari masyarakat di 38 provinsi di Indonesia untuk memperkuat strategi pengawasan yang inklusif. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “*kinerja BPOM*”, “*Pengawasan Produk*”, dan “*Sosialisasi BPOM ke Masyarakat*”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 1.2 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Adapun di tingkat lokal, aspirasi masyarakat juga mencerminkan berbagai isu utama yang dihadapi Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar. yaitu

1. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana** – Masyarakat menginginkan peningkatan fasilitas untuk mendukung layanan yang lebih optimal, sejalan dengan kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
2. **Penanganan Pengaduan yang Transparan** – Aspirasi masyarakat menyoroti perlunya komunikasi yang lebih baik terkait tindak lanjut pengaduan, yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

3. **Waktu Penyelesaian Layanan** – Masukan terkait lambatnya penyelesaian layanan menjadi pengingat untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor agar layanan tetap sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
4. **Penyebaran Informasi yang Masif** – Kebutuhan masyarakat akan edukasi yang lebih luas terkait obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) dan berbahaya, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif melalui media visual dan kolaborasi lintas sektor.

Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar percaya bahwa pengawasan obat dan makanan adalah tugas dinamis yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pengawasan, tetapi juga aktor strategis yang dapat mendukung upaya ini dengan menjadi konsumen yang cerdas. Melalui penjangkaran aspirasi, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program pengawasannya agar tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan lokal.

1.2. Potensi dan Isu Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan untuk menganalisis berbagai aspek, seperti tantangan, peluang, kelemahan, dan potensi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diperlukan analisis yang komprehensif dan terpadu terhadap factor seperti lingkungan, termasuk isu-isu strategis yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 Isu Internal

a. Payung Hukum yang Belum Kuat

Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan saat ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasan obat dan alat kesehatan, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Perlu dicatat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 awalnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, namun undang-undang tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Sementara itu, pengawasan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Dari sisi kelembagaan, Badan POM telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, masih diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif untuk mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Sayangnya, pengawasan obat dan makanan belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang

tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini belum memadai dan belum mampu mendukung pengawasan obat dan makanan secara optimal. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan tambahan pegawai. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan kebutuhan SDM yang ideal. Saat ini, persentase pemenuhan jumlah pegawai baru mencapai 50% dari total kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Untuk menutupi gap tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih memerlukan penambahan SDM sebanyak 54 orang.

c. Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini melakukan pengujian komoditas pangan menggunakan metode uji cepat (*rapid test kit*) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengujian dilakukan di Balai Koordinator.

Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar direncanakan mulai melakukan pengujian secara mandiri, meskipun masih terbatas pada beberapa parameter tertentu. Ke depannya, diharapkan kapasitas pengujian di Loka POM semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri untuk lebih banyak parameter.

d. Operasional/ Administrasi

Salah satu isu operasional dan administrasi yang dihadapi adalah ketidaktertiban pegawai dalam mengarsipkan dokumen administrasi serta pengisian form peminjaman dan pemeliharaan kendaraan. Dokumen administrasi sering kali tidak tersip dengan baik, sehingga menyulitkan proses pencarian data ketika dibutuhkan. Selain itu, form peminjaman kendaraan sering tidak diisi dengan lengkap atau tidak diserahkan tepat waktu, menyebabkan kesulitan dalam melacak penggunaan kendaraan. Form pemeliharaan kendaraan juga tidak diisi secara konsisten, mengakibatkan jadwal perawatan yang tidak teratur dan berpotensi menurunkan kondisi kendaraan.

Dampak dari isu ini antara lain menurunnya efisiensi operasional, risiko kehilangan data, dan kerugian operasional akibat kerusakan kendaraan yang tidak terpantau. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai, penerapan sistem digitalisasi untuk pengarsipan dan pengisian form, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penerapan sistem sanksi dan reward dapat mendorong pegawai untuk lebih tertib dalam administrasi.

e. Pengembangan Kompetensi

Mayoritas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang merangkap, sehingga pengembangan kompetensi menjadi sangat penting. Tanpa kompetensi yang memadai, pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih sulit dan kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan,

workshop, atau program pengembangan keterampilan agar mereka dapat menjalankan tugas ganda dengan lebih efisien dan profesional.

e. Teknologi

Penggunaan sistem teknologi informasi (IT) dalam pelayanan dan pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur IT, kurangnya pelatihan bagi SDM dalam mengoperasikan sistem, serta belum terintegrasinya sistem IT dengan proses kerja yang ada. Akibatnya, efisiensi dan akurasi dalam pelayanan dan pengawasan menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur IT, pelatihan rutin bagi SDM, serta pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan user-friendly.

1.2.2 Isu Eksternal

a. Teknologi

Sarana dan prasarana teknologi informasi (IT) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum memadai seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, infrastruktur jaringan internet yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali di beberapa pulau area pengawasan yang menjadi tantangan besar. Hal ini membuat akses informasi, komunikasi, dan layanan berbasis teknologi menjadi sangat sulit bagi masyarakat dan pegawai loka pom di daerah 3T.

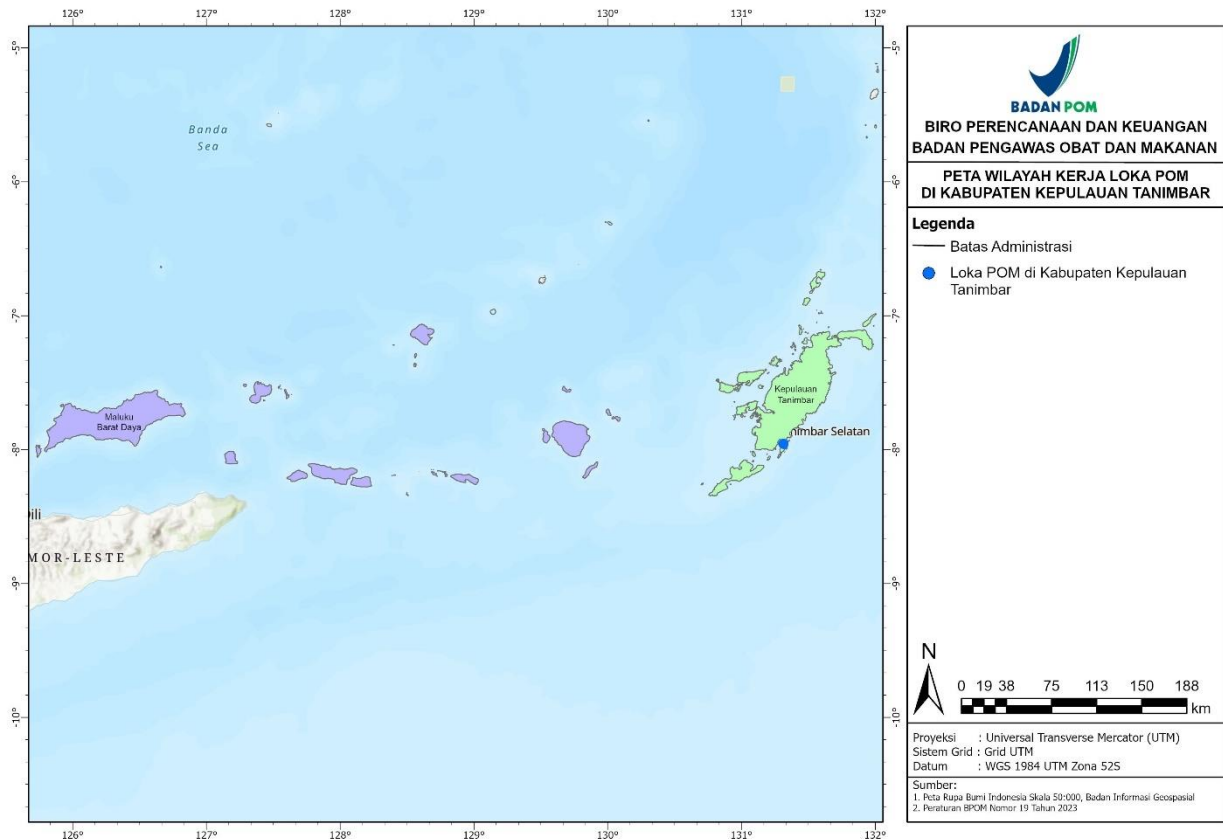
b. SDM

Tingkat pengetahuan masyarakat, pelaku usaha, dan peserta KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sangat bervariasi, menciptakan tantangan dalam pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi. Sebagian peserta mungkin sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi, seperti internet, aplikasi, atau media sosial, sementara yang lain masih kesulitan mengakses atau memanfaatkan alat-alat digital. Ketidaksamaan tingkat literasi digital ini menyebabkan terbatasnya pemahaman tentang peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan KIE. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak selalu tersebar secara merata, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta menjadi terhambat.

c. Geografis

Secara geografis, lokus pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah kepulauan dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lama. Jarak antara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, misalnya, mencapai sekitar **300-350 kilometer**, tergantung pada rute pelayaran yang digunakan. Kondisi ini diperparah oleh cuaca ekstrem yang sering terjadi, menyebabkan pengawasan di wilayah-wilayah terjauh sulit dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti waktu perjalanan, jenis kendaraan yang memadai seperti transportasi laut ataupun udara. Selain itu, penggunaan teknologi

komunikasi yang efektif dapat membantu menjembatani keterbatasan geografis dan memastikan pengawasan obat dan makanan tetap berjalan dengan baik di seluruh wilayah.



Gambar 1.3. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

d. Transportasi

Akses transportasi di wilayah kabupaten kepulauan Tanimbar dan maluku barat daya ini masih sangat terbatas, baik dari segi ketersediaan moda transportasi maupun frekuensi layanannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit, seperti wilayah kepulauan atau daerah terpencil, serta kurang memadainya infrastruktur jalan, pelabuhan, atau bandara. Keterbatasan ini menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk pengawasan obat dan makanan.

e. Iklim

Perubahan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, angin kencang, atau kemarau panjang, sering terjadi di wilayah ini. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi gempa yang cukup tinggi akibat aktivitas tektonik. Kombinasi kedua faktor ini menimbulkan risiko serius bagi keselamatan masyarakat, dan pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1.2.3 Isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029

Berdasarkan penjabaran isu internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depannya, yaitu:

1. **Keterbatasan SDM dan Infrastruktur:** Jumlah SDM yang belum memadai dan sarana prasarana yang terbatas akan menghambat efektivitas pengawasan.
2. **Tantangan Geografis dan Transportasi:** Wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas dan cuaca ekstrem akan menyulitkan pengawasan di daerah terpencil.
3. **Keterbatasan Teknologi:** Infrastruktur IT yang belum memadai dan jaringan internet yang terbatas akan menghambat pelayanan dan pengawasan berbasis teknologi.
4. **Regulasi yang Belum Komprehensif:** Tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan akan mengurangi efektivitas pengawasan.
5. **Tingkat Literasi Digital yang Beragam:** Perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha tentang teknologi informasi akan menyulitkan sosialisasi dan edukasi.

1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Untuk merumuskan strategi organisasi yang efektif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan dan menganalisis bidang-bidang kunci yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bidang-bidang tersebut antara lain Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan.

Selanjutnya, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi dua aspek utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berasal dari luar organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan tantangan, baik dari dalam maupun luar, yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Strenght

1. Sistem pengawasan yang full spectrum
2. kompetensi ASN BPOM sudah memadai
3. Kualitas pelayanan publik yang optimal

Weakness

1. Jumlah dan kompetensi ASN BPOM belum memadai
2. Infrastruktur dan fasilitas laboratorium yang belum memadai
3. Sistem pengawasan yang full spectrum kompetensi ASN BPOM sudah memadai Kualitas pelayanan publik yang optimal

Opportunity

1. Pesatnya Perkembangan TIK membuat kemudahan dalam peningkatan kompetensi sdm, kinerja dan dalam pengawasan OM
2. Opini positif publik terhadap BPOM (brand image BPOM kepada masyarakat)
3. Peluang kerjasama antar stakeholder dan tokoh masyarakat

Threat

1. Letak dan Faktor Geografis Wilayah yang cukup sulit diakses / dijangkau diikuti dengan belum optimalnya letak pembangunan tata kota
2. Pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas pengawasan dan kemampuan masyarakat
3. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

2.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

*"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat **bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**"*

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses

pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat

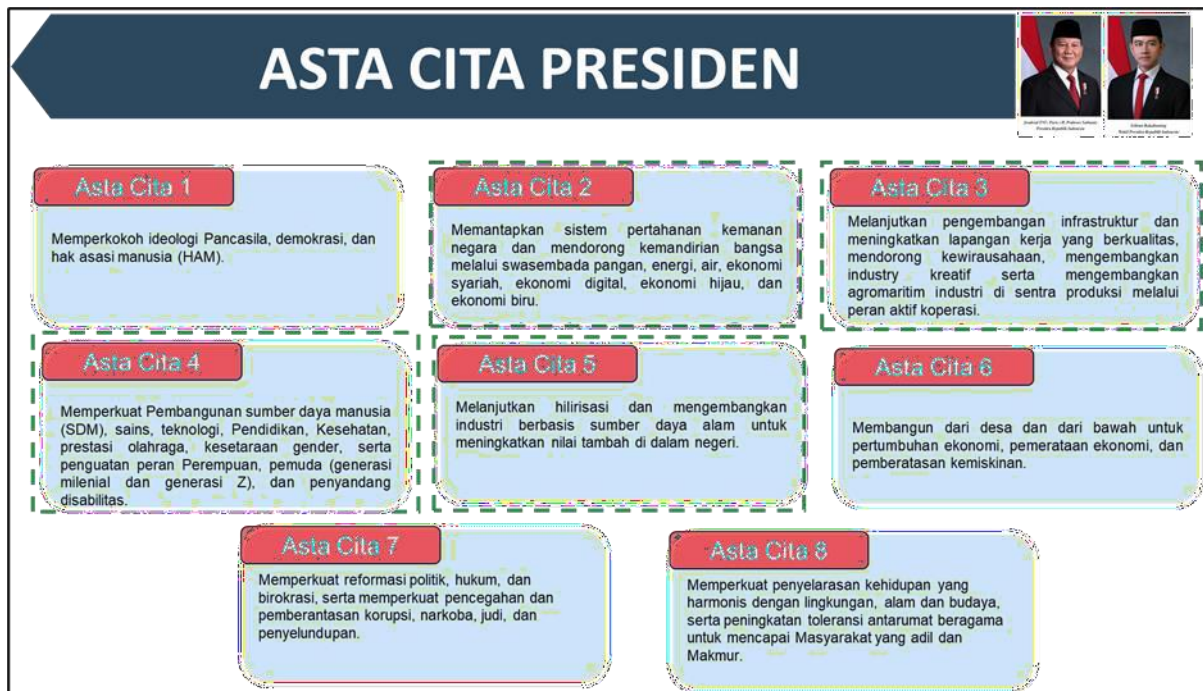
Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi

Nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandangabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 — 2029. Tujuan-tujuan

ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 — 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Memperkuat kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan: Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan yang Aman dan Bermutu

Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatkan efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri

dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. **Layanan Publik BPOM yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator SS
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
			Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu
			Persentase PIRT yang aman dan bermutu
			Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
			Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta	Pelayanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
		Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
			Persentase UMKM

UMKM dalam rangka membangun yang produktif dan berdaya saing	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan
			Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.11. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di DRAFT 58 seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. BPOM mendukung utamanya prioritas nasional berikut :

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
4. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

3.21 Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO

- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
 - n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 - o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
 - p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
 - q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi
2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi
- Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

3.21. Arah Kebijakan BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- a. **Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan

pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

- b. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline** : Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
- c. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM** : BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- d. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
- e. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
- f. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

3.31. Strategi BPOM

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Indonesia memasuki fase menuju Indonesia Emas 2045 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang RPJPN 2025-2045. RPJPN bertujuan mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Fokus utamanya adalah pembangunan wilayah merata, infrastruktur ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan, dengan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan untuk pertumbuhan inklusif dan ketahanan sosial budaya.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) untuk mendukung transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. **Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045 terdiri atas Transformasi Sosial , Ekonomi, dan Tatakelola. Transformasi sosial di Indonesia fokus pada pengurangan stunting, peningkatan harapan hidup, dan pengendalian penyakit menular serta produk berbahaya seperti rokok. Di bidang ekonomi,**

Indonesia mengarah pada hilirisasi produk obat dan makanan untuk ekspor, peningkatan UMKM, dan pengembangan ekonomi sirkular melalui bioteknologi dan digitalisasi. Sementara itu, transformasi tatakelola mencakup manajemen ASN berbasis merit, regulasi adaptif, serta penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Semua upaya ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan perekonomian nasional.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan Pengawasan Pre-Post Market

- Mendorong inovasi untuk memperkuat pengawasan terhadap farmakovigilans (pemantauan efek samping obat) dan memastikan seluruh produk dan sarana yang beredar memiliki izin dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- Memperluas cakupan pengawasan dengan melibatkan produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Fokus pada pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, baik yang beredar secara formal maupun informal, termasuk yang tidak terdaftar.

2. Penguatan Penindakan Kejahatan di Bidang Farmasi dan Pangan Olahan

- Fokus pada pencegahan dan deteksi kejahatan dalam peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik yang terjadi secara offline (di pasar tradisional, toko, dll) maupun online (platform e-commerce, media sosial, dll).
- Melakukan penyelidikan dan penindakan yang lebih tegas terhadap praktik ilegal, seperti peredaran produk tanpa izin edar, penipuan, dan distribusi produk yang membahayakan.

3. Peningkatan Regulatory Assistance untuk UMKM

- Memberikan asistensi regulasi yang lebih baik untuk pelaku usaha, dengan fokus pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), agar mereka dapat mematuhi regulasi yang ada dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan.
- Menyediakan bimbingan teknis mengenai cara memenuhi standar dan mendapatkan izin edar untuk produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses informasi dan pendampingan mengenai prosedur pengajuan izin, pengujian, dan pengawasan produk.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.
- Mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar, baik melalui saluran resmi maupun program pengawasan berbasis masyarakat.

5. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

- Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri (instansi pemerintah terkait, lembaga pengujian, asosiasi industri, dll) maupun luar negeri (organisasi internasional, mitra luar negeri) untuk meningkatkan kualitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Menjalin sinergi dalam hal berbagi informasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam pengawasan produk.

6. Peningkatan Kapasitas SDM, Pengujian Laboratorium, dan Transformasi Digital

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kantor Loka POM untuk lebih memahami tren dan isu terbaru dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan.
- Meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa setiap produk yang diuji memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efikasi.
- Melakukan transformasi digital dalam pengawasan, seperti menggunakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan, pengawasan, dan analisis data terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

7. Penguatan Dukungan Manajemen dalam Pengawasan

- Menyusun sistem manajemen yang efektif untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien dan terstruktur.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi di dalam Kantor Loka POM, serta memperkuat sistem pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data yang baik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan analisis terhadap program strategis dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Dari analisis tersebut, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities): Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

a. Penguatan Kompetensi SDM Melalui Pelatihan dan Pengembangan:

- Memanfaatkan program pelatihan/bimtek/forum komunikasi rutin dari BPOM Pusat secara optimal untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang inspeksi CDOB, inspeksi pangan, dan pemanfaatan TIK.
- Prioritaskan pelatihan untuk SDM yang masih kurang kompeten di bidang tertentu, sehingga terjadi pemerataan kompetensi.
- Dorong SDM Infokom untuk mengembangkan kompetensi dalam pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk diseminasi informasi dan pengawasan.

- Manfaatkan keahlian SDM yang telah menyelesaikan S2 di luar negeri untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada SDM lainnya.
- b. Penguatan Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Teknologi:**
- Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis online yang mudah diakses masyarakat, memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi mobile.
 - Membangun kemitraan dengan komunitas lokal dan tokoh masyarakat untuk memperluas jaringan informasi dan pengawasan partisipatif.
 - Memanfaatkan grup dagang media sosial dan platform online lainnya untuk memonitor peredaran obat dan makanan ilegal.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
- c. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi yang Efektif:**
- Merancang program sosialisasi dan edukasi yang inovatif dan menarik, memanfaatkan berbagai kanal komunikasi (media sosial, kegiatan komunitas).
 - Menyesuaikan konten sosialisasi dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.
 - Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer lokal dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas pesan.
 - Mengadakan kegiatan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, tentang regulasi dan persyaratan di bidang obat dan makanan.
- 2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities): Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang**
- a. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi SDM Secara Terencana:**
- Mengusulkan penambahan formasi pegawai, terutama PPNS dan SDM non-teknis, berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi.
 - Menyusun rencana pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi.
 - Melakukan rotasi dan mutasi internal secara terencana untuk pemerataan pengalaman dan pengembangan kompetensi.
 - Mempertimbangkan rekrutmen tenaga kontrak/ahli untuk mengisi kekurangan SDM di bidang tertentu secara temporer.
- b. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Pengawasan:**
- Mengusulkan pengadaan peralatan khusus yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan, seperti alat uji cepat dan peralatan laboratorium.
 - Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan berbasis TIK.
 - Memperkuat infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet dan perangkat keras/lunak, untuk mendukung efektivitas pengawasan.

- c. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Program yang Terstruktur:**
 - Membentuk forum komunikasi atau komunitas pengawas obat dan makanan di masyarakat.
 - Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi publik, seminar, dan workshop.
 - Membangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.
3. **Strategi ST (Strengths-Threats): Memaksimalkan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman**
- a. **Penguatan Koordinasi dan Intelijen dalam Penegakan Hukum:**
 - Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) melalui forum koordinasi Criminal Justice System.
 - Meningkatkan kemampuan intelijen dan investigasi untuk mengungkap jaringan kejahatan obat dan makanan.
 - Mengembangkan sistem informasi dan database kejahatan obat dan makanan untuk memetakan tren dan modus operandi.
 - b. **Pengembangan Sistem Informasi dan Keamanan Data yang Terintegrasi:**
 - Menerapkan standar keamanan data dan informasi yang ketat untuk melindungi data dari ancaman cyber.
 - Membangun sistem backup dan recovery data yang handal untuk mencegah kehilangan data.
 - Melakukan audit keamanan sistem informasi secara berkala.
 - c. **Pengembangan Strategi Pengawasan yang Adaptif dan Berbasis Risiko:**
 - Melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - Mengembangkan strategi pengawasan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi geografis, cuaca, dan modus kejahatan.
 - Memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengawasan untuk meminimalkan resistensi.
4. **Strategi WT (Weaknesses-Threats): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman**
- a. **Prioritisasi Tugas dan Peningkatan Efisiensi Kerja:**
 - Melakukan analisis beban kerja dan menetapkan prioritas tugas berdasarkan tingkat risiko dan urgensi.
 - Meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan TIK dan penyederhanaan prosedur.
 - Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
 - b. **Penguatan Kapasitas Internal Secara Bertahap dan Terukur:**

- Menyusun rencana penguatan kapasitas internal yang realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
 - Melakukan advokasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan dukungan sumber daya yang dibutuhkan.
 - Memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien.
- c. **Peningkatan Sosialisasi dan Akses Layanan Online yang Inklusif:**
- Merancang program sosialisasi yang khusus ditujukan untuk masyarakat yang belum familiar dengan layanan online.
 - Menyediakan alternatif layanan offline bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan online.
 - Bekerja sama dengan komunitas lokal dan tokoh masyarakat untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses.

3.3 Kerangka Regulasi

Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif memerlukan landasan regulasi yang kuat dan koordinasi yang solid antar berbagai pihak. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang mengemban tugas teknis, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan regulasi yang komprehensif, mencakup aspek teknis, administratif, dan strategis. Hal ini penting karena pengawasan Obat dan Makanan merupakan isu multi-sektor yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta. Oleh karena itu, perancangan regulasi harus selaras dengan kompleksitas tugas pengawasan ini.

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengawasan Obat dan Makanan adalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Contohnya, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Koordinasi ini harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk memastikan keselarasan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah dengan kebijakan nasional, BPOM menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Guna mengatasi permasalahan koordinasi yang lebih luas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai:
 - a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
 - b. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;
 - c. penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;
 - d. informasi nilai gizi pada bagian depan label;
 - e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - f. sampling dan pengujian;
 - g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
 - h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
 - i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan;
 - j. penyerahan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket;
 - k. penandaan obat;
 - l. periklanan dan promosi obat;
 - m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan
 - n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
 - a. cara sanitasi yang baik;
 - b. persyaratan cemaran pangan olahan;
 - c. bahan tambahan pangan;

- d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
 - e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
 - f. iradiasi pangan;
 - g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
 - h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;
 - i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
 - j. bahan penolong;
 - k. tata cara pendaftaran sarana produksi;
 - l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
 - m. persyaratan impor pangan olahan;
 - n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
 - o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
 - p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
 - q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
 - r. label pangan; dan
 - s. iklan pangan.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan
 4. MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penataan organisasi BPOM untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi BPOM eksisting. Kelembagaan BPOM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor

80 Tahun 2017 tentang BPOM telah berlaku selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2025 sehingga perlu direvisi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi; dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

- 1) Sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik
- 2) Ekstrak bahan alam
- 3) Suplemen kesehatan
- 4) Pangan olahan; dan
- 5) Bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan

instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Untuk memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM, termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu UPT BPOM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

3.4.2 Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan dan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) berdasarkan persyaratan ISO 37001:2016 untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti-suap di Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 difokuskan kepada

aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal: a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik. b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.3 Pengelolaan SDM Aparatur Kebutuhan SDM

Pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029, yang turut mendukung Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang DRAFT 51 disabilitas sesuai dengan Tujuan BPOM 2025-2029 yaitu Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan *skill* sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

SDM Aparatur yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai tahun 2025 sejumlah 15 orang. Selain dari sisi jumlah SDM yang telah ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Pengembangan kompetensi ASN di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV. 1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM dan Indikator Kinerja Utama dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar selama periode lima tahun. Terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025- 2029 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 .Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	81,25	82,5	83,75	85
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	90	92
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	78	80	82	84	85

	lintas sektor	ditindaklanjuti oleh stakeholder					
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	94,4	95,6	96,6	97,6
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,6	94,6	95,6	96,8	98
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,93	88,81	89,69	90,57	91,45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	45.5	86.5	87.5	88.5	89.5
7	Terlaksananya	Persentase Keberhasilan	65	70	75	80	85

	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh UPT BPOM	90	91	92	93	94
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,9	3,95	4
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Organisasi yang Optimal	Unit					
		yang					
		Nilai AKIP UPT BPOM	76,55	77	77,55	78	78,55
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.66	2.7	2.72	2.76	2.8

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencakup pengawasan post market. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor serta melakukan pencegahan kejahatan, intelijen dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas

TOTAL	12.282.785	5.828.151	22.374.651	5.283.651	5.283.651
--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dalam kurun waktu 2025-2029 serta mendukung dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025 2029, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu UPT BPOM sebagai UPT yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku dengan wilayah kerja 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama lima (5) tahun. Rencana strategis tahun 2025-2029 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar			Kab. Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya						12.282.785	5.828.151	22.374.651	5.283.651	5.283.651
Program Pengawasan Obat dan Makanan													
	SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan											
	1.1.	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar		80	81,25	82,5	83,75	85					
	1.2.	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM		-	27	28	29	30					
	1.3.	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		75	77	79	81	83					
	1.4.	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar		85	87	89	90	92					
	1.5	Persentase sampel KLB keracunan pangan		100	100	100	100	100					

		yang diuji sesuai standar											
	SS 2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor											
	2.1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu		78	80	82	84	85					
	SS 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan											
	3.1.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	88	89	90	91					
	3.2.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	88	90	92	95					

	3.3.	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	94,4	95,6	96,6	97,6					
	3.4.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95					
	3.5.	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan		93,6	94,6	95,6	96,8	98					
	SS4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT											
	4.1.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	12	13	16	20					
	SS5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT											
	5.1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan		87,93	88,81	89,69	90,57	91,45					

		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT											
	5.2.	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		2	3	4	5	6					
	5.3.	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1					
	5.4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1					
	SS6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu											
	6.1.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		45.5	86.5	87.5	88.5	89.5					
	SS7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT											
	7.1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan		65	70	75	80	85					

		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT											
	SS8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif											
	8.1.	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT		90	91	92	93	94					
	SS9	Layanan Publik UPT yang Prima											
	9.1.	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,75	3,85	3,9	3,95	4					
	SS10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal											
	10.1	Nilai AKIP UPT BPOM		76,55	77	77,55	78	78,55					
	10.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5					
	10.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,66	2,70	2,72	2,76	2,8					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan <i>pre market</i> dan <i>post market</i> untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai: - upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik; penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring; penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	- Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan - Deputi Bidang Penindakan - Biro Hukum dan Organisasi	- Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian / Lembaga terkait	2025-2029

	d. informasi nilai gizi pada bagian depan label; e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian; f. sampling dan pengujian; g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma; h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya; i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan; j. penyerahan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket; k. penandaan obat; l. periklanan dan promosi obat; m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak				
2	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai: a. cara sanitasi yang baik; b. persyaratan cemaran pangan olahan; c. bahan tambahan pangan; d. bahan yang dilarang digunakan dalam	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian / Lembaga terkait	2025-2029

	pangan olahan; e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik; f. iradiasi pangan; g. kemasan pangan dan zat kontak pangan; h. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; i. bahan penolong; j. tata cara pendaftaran sarana produksi; k. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; l. persyaratan impor pangan olahan; m. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan; n. tindak lanjut pengawasan pangan olahan; o. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan; p. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan. q. label pangan; dan r. iklan pangan.				
3	Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian n/ Lembaga terkait	2025-2029

	Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.		Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Biro Hukum dan Organisasi		
5	MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3. Kementerian Hukum dan HAM 4. Kementerian / Lembaga terkait	2025-2029

Nomor : PR.07.21.06.25.199

Jakarta, 16 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Tanggapan atas Usulan Perubahan
Target Bulanan RAPK Loka POM di
Kab. Kep. Tanimbar Tahun 2025

Yth. Kepala Loka POM di Kab. Kep. Tanimbar
Di Kab. Kep. Tanimbar

Sehubungan dengan Surat Kepala Loka POM di Kab. Kep. Tanimbar nomor B-PR. 07.02.19C.05.25.134 tanggal 23 Mei 2025 perihal Usulan Revisi Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, RAPK merupakan lampiran dari Perjanjian Kinerja (PK). Adapun revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan tetap memastikan target akhir tahun (B12) tetap sesuai dengan target pada dokumen PK.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
3. Adapun tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kep. Tanimbar adalah:
 - a. Agar dapat segera melakukan penyesuaian RAPK melalui aplikasi Simetris serta melakukan pengunggahan dokumen RAPK yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT melalui **bit.ly/PK-RAPK-2025** khususnya pada folder "**Revisi RAPK 2025**", dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Lampiran
Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor : PR.07.21.06.25.199
Tanggal : 16 Juni 2025

No	Indikator	Justifikasi Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Revisi target dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana hanya terdapat satu sarana produksi sediaan farmasi. Sesuai dengan rencana kerja, pelaksanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut dijadwalkan pada bulan Agustus. Oleh karena itu, penyesuaian target diperlukan agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.	Mengacu surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 poin 4b dimana "Revisi target hanya dapat dilakukan pada indikator yang bersifat kumulatif (nonflat)" maka permohonan perubahan target untuk tidak dapat disetujui . Kendala dalam pencapaian target bulanan dapat disampaikan pada laporan kinerja interm atau dengan usulan pengecualian perhitungan kinerja
2	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Berdasarkan hasil evaluasi dan exercise ulang terhadap tools SKL yang digunakan. Dari hasil exercise tersebut, diketahui bahwa target yang diajukan sebelumnya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan.	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 4.48, maka Usulan perubahan dapat disepakati karena telah memenuhi ketentuan perubahan target RAPK berdasarkan surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
3	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	Pelaksanaan advokasi mengalami pergeseran waktu ke bulan April, yang disebabkan oleh perubahan lokus sekolah sasaran. Perubahan lokus tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian waktu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 50, maka Usulan perubahan dapat disepakati .
4	Jumlah desa pangan aman	Kegiatan di sekolah juga mengalami penyesuaian karena berteaptan dengan pelaksanaan ujian praktik dan ujian tengah semester. Hal ini memengaruhi kesiapan sekolah	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 25, maka Usulan perubahan dapat disepakati .

		dalam mengimplementasikan kegiatan pembudayaan keamanan	
5	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Penyesuaian Target dengan Definisi Operasional yaitu 25% Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan + 25% Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT, akan diperoleh di akhir tahun. Sehingga untuk target tahun berjalan yaitu B4 hingga B11 diturunkan menjadi 50%	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 50, maka usulan perubahan target pada B4-B11 usulan tersebut dapat disepakati.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.